



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan merupakan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan kependudukan didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan kependudukan yang mengakomodir peran serta berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kota Yogyakarta dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Daerah untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan Daerah.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan pengarahan mobilitas, serta penataan Administrasi Kependudukan.
3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan Penduduk setempat.
4. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
7. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
8. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.



9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11. Persebaran Penduduk adalah sebaran Penduduk secara keruangan.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.
14. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan Daya Tampung Lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
18. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan Daya Tampung Lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
19. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan GDPK untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan GDPK bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Penduduk tumbuh seimbang;
- b. manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
- e. Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 4

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan dengan:

- a. mendorong pertumbuhan Penduduk seimbang;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- c. meningkatkan Kualitas Penduduk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
- d. meningkatkan ketahanan Keluarga, mendorong kesejahteraan Keluarga, dan meningkatkan kualitas lingkungan Keluarga;
- e. meningkatkan perlindungan sosial;
- f. meningkatkan infrastruktur penunjang mobilitas; dan
- g. mengelola sistem informasi pelayanan Administrasi Kependudukan.

BAB III

TIM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan GDPK secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program, pelaksanaan, serta pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah.



- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah dari perangkat daerah terkait;
 - b. lembaga nonpemerintah; dan
 - c. pihak lain yang terkait.
- (6) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) GDPK disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN;
 - c. BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN;
 - d. BAB IV VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
 - e. BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH;
 - f. BAB VI PETA JALAN; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.
- (2) GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan GDPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 66



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan Pembangunan Kependudukan yang diwujudkan dalam program lima tahunan untuk mencapai target Pembangunan Kependudukan. GDPK merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Kependudukan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyusunan GDPK merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Aspek pembangunan dalam GDPK terdiri dari pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pengarahan Mobilitas Penduduk, Pembangunan Keluarga dan pengembangan data *base* Kependudukan. Tujuan utama dalam penyusunan GDPK adalah untuk mewujudkan Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga dapat menjadi faktor yang penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:

1. Penduduk tumbuh seimbang;
2. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
3. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
4. keseimbangan Persebaran Penduduk yang serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
5. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.



Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memiliki dokumen GDPK. Dokumen GDPK telah disusun pada tahun 2018. Dokumen GDPK tersebut berisi tentang kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta, kondisi Kependudukan yang diinginkan, permasalahan dan tantangan, pokok-pokok dalam Kependudukan serta *roadmap* Kependudukan. Beberapa tantangan dan permasalahan berdasarkan dokumen GDPK tahun 2018 adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak, pelayanan kesehatan yang belum optimal, terjadinya kasus kenakalan remaja, pengaturan terhadap migrasi yang masuk ke wilayah Kota Yogyakarta serta belum terintegrasinya antara data Kependudukan dengan data sektoral.

Guna melakukan tinjauan terhadap dokumen GDPK Kota Yogyakarta, maka pada tahun 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan tinjauan terhadap dokumen GDPK yang telah disusun pada tahun 2018. Tinjauan dimaksudkan untuk memperbaharui data serta kondisi Kependudukan terkini dan penyusunan draf Peraturan Wali Kota terkait dengan GDPK.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- k. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- n. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



- p. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- q. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- r. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- w. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2025-2045 adalah untuk melakukan perbaruan (*updating*) terhadap dokumen GDPK Kota Yogyakarta yang telah disusun pada tahun 2018. Dokumen GDPK dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan kualitas Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan penataan Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta.

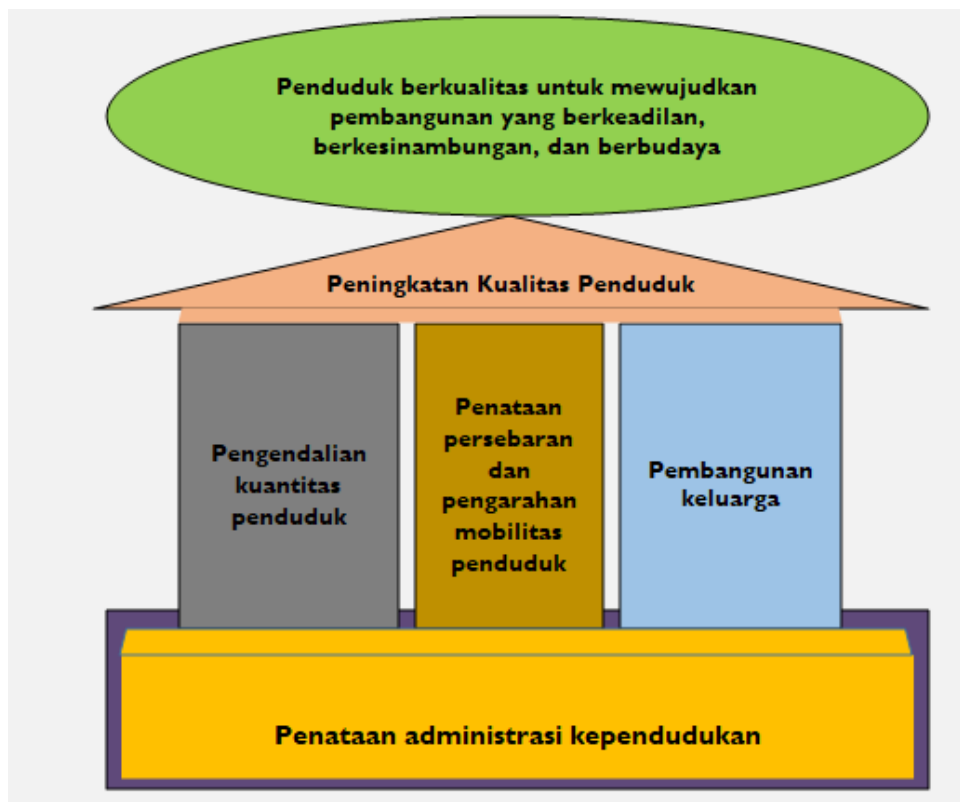


1.3.2. Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya Kualitas Penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Tujuan khusus penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) tahun 2025-2045 adalah untuk:

1. mewujudkan kondisi Penduduk yang tumbuh seimbang melalui pengelolaan Kuantitas Penduduk yang berkaitan dengan jumlah, komposisi, pertumbuhan, dan Persebaran Penduduk;
2. mewujudkan Penduduk yang berkualitas melalui tiga pilar pembangunan sumberdaya manusia yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang didasari pada kehidupan beragama dan berbudaya;
3. mewujudkan Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni serta mampu merencanakan sumber daya Keluarga;
4. mewujudkan pencapaian Persebaran Penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan; dan
5. mewujudkan Administrasi Kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data Kependudukan.

Secara konseptual, tujuan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3.1. Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta

Sumber: Dokumen Pedoman Penyusunan GDPK



1.4. Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan Kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan Kualitas Penduduk dalam rangka mencapai Pembangunan Berkelanjutan.
2. Pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai *the window of opportunity* melalui pengelolaan Kuantitas Penduduk dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan Pengarahan Mobilitas Penduduk.
3. Keluarga berkualitas dengan mengoptimalkan fungsi Keluarga dalam mencapai ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya serta mengoptimalkan sumberdaya Keluarga.
4. Pembangunan *database* Kependudukan dengan sistem informasi data.

1.5. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Berikut detail metode pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pendekatan yang digunakan dalam Kajian Review Dokumen GDPK adalah pendekatan campuran (*mixed method*), yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi data-data Kependudukan yang diperoleh dari berbagai instansi dan lembaga pemerintahan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi secara mendalam berbagai permasalahan Kependudukan.

Teknik Pengambilan Data dan Kebutuhan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan GDPK meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara mendalam maupun *one on one meeting* dengan informan kunci dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan substansi GDPK. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa OPD yang terkait dengan isu dan permasalahan GDPK di Kota Yogyakarta. Berikut data-data sekunder yang dikumpulkan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rencana Data Sekunder

No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
1	Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	a. Fertilitas Penduduk	1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dokumentasi Data Sekunder



No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
		2. Laju Pertumbuhan Penduduk 3. Tingkat kelahiran kasar/Crude Birth Rate (CBR) 4. Tingkat Kelahiran Kasar dari Pertumbuhan Alami (The Crude Rate of Natural Increase (CRNI) 5. Tingkat kesuburan umum / Total Fertility Rate (TFR) 6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 7. Cakupan Peserta KB Aktif 8. Persentase perkawinan usia anak	
		9. Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate -CDR) 10. Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate-ASDR) 11. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate - IMR) 12. Angka Kematian Balita (Childhood Mortality Rate) 13. Angka kematian Ibu (Maternal Mortality Rate - MMR)	Dokumentasi Data Sekunder
2	Peningkatan Kualitas Penduduk	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Pembangunan Manusia	Dokumentasi Data Sekunder
	a. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Bayi 3. Angka Kematian Balita 4. Angka Kematian Ibu 5. Prevalensi Balita Gizi Buruk 6. Prevalensi <i>Stunting</i> 7. Rumah tangga mengakses air bersih layak	Dokumentasi Data Sekunder



No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
		8. Rumah tangga mengakses sanitasi layak 9. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	
	b. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan	1. APK/APM/APS SD/MI 2. APK/APM/APS SMP/MTs 5) 3. APK/APM/APS SMA/MA/SMK 4. Rata-rata lama sekolah 5. Harapan Lama Sekolah 6. Angka Putus Sekolah	Dokumentasi Data Sekunder
	c. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi	1. PDRB per Kapita 2. Rasio Ketergantungan 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 5. Persentase Penduduk Miskin	Dokumentasi Data Sekunder
3.	Pengarahan Mobilitas Penduduk	1. Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kemantren 2. Migrasi Masuk 3. Migrasi Keluar 4. Migrasi Netto	Dokumentasi Data Sekunder
4.	Pembangunan Keluarga	1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 2. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 3. Indeks Pembangunan Keluarga 4. Kasus Perceraian	Dokumentasi Data Sekunder
5.	Pengembangan Basis Data Kependudukan	1. Pengembangan <i>database</i> Kependudukan 2. Pemanfaatan <i>database</i> Kependudukan 3. Persentase Penduduk memiliki KTP Elektronik 4. Persentase anak (Usia 0-17 tahun) memiliki akte kelahiran	Dokumentasi Data Sekunder



No	Variabel	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
		5. Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 6. Persentase kepemilikan akta perkawinan 7. Persentase kepemilikan akta perceraian 8. Persentase kepemilikan kartu keluarga 9. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	
6.	Road Map dan GD	1. Peta Jalan 2. Visi Misi 3. Strategi, Kebijakan, dan Program	FGD <i>One on One Meeting</i>

Namun demikian data-data yang disebutkan di atas memiliki banyak turunan data sehingga masih akan diuraikan secara lebih detail dalam dokumen GDPK. Data-data tersebut juga akan bertambah seiring dengan kebutuhan data dan dinamika pada saat proses penyusunan GDPK.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan digambarkan melalui diagram, grafik, dan peta. Selain itu, terdapat juga data yang diolah secara kualitatif didasarkan pada hasil wawancara mendalam dan FGD.

Sistematika Penulisan Dokumen GDPK

Sistematika penulisan dokumen GDPK disesuaikan pada Panduan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar oleh BKKBN sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian, kedudukan, ruang lingkup, dan pendekatan pengembangan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.



- **BAB II Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan.**

Bab ini berisikan analisis situasi Kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan 5 pilar Kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan, kajian praktik program unggulan, maupun kajian akademik.

- **BAB III Proyeksi Penduduk dan Kondisi Ideal Kependudukan**

Bab ini berisi data parameter Kependudukan 25 tahun hasil perhitungan proyeksi, analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan, serta kondisi ideal yang diharapkan.

- **BAB IV Visi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah**

Bagian ini menjabarkan visi-misi dan isu strategis dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun Daerah.

- **BAB V Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan Daerah**

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan Daerah dalam pembangunan 5 pilar Kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada 5 (lima) pilar Pembangunan Kependudukan.

- **BAB VI Peta Jalan (*Roadmap*)**

Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan Pembangunan Kependudukan (program prioritas).

- **BAB VII Penutup**

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan



BAB II
ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

2.1. Analisis Situasi Kependudukan

Analisis situasi Kependudukan membahas terkait dengan kondisi terkini Kependudukan yang meliputi lima pilar GDPK yaitu kondisi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, Pembangunan Keluarga, persebaran dan mobilitas serta pembangunan data dan informasi Kependudukan. Analisis situasi terkini dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kondisi Kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang.

2.1.1. Kuantitas Penduduk

Kuantitas Penduduk dalam kajian ini meliputi jumlah, laju pertumbuhan, dan komposisi Penduduk. Data Kuantitas Penduduk yang disajikan merupakan *update* dari dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2035. Pada pembahasan berikut akan disajikan analisis deskriptif pada masing-masing variabel Kependudukan.

2.1.5.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2022 adalah sebanyak 378.913 jiwa yang tersebar di 14 kemantren. Tabel 2.1.1. berikut menggambarkan persebaran jumlah Penduduk antar kemantren yang bervariasi. Pada tahun 2022 terdapat 1 kemantren yang dihuni lebih dari 10% Penduduk Kota Yogyakarta, yaitu Kemantren Umbulharjo. Disisi lain, terdapat lima kemantren dengan persentase Penduduk di bawah 5% dengan persentase terendah di Kemantren Pakualaman sebesar 2,44% dan Kemantren Gondomanan sebesar 3,42%. Secara kuantitas, jumlah Penduduk Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.1.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk Menurut Kemantren Tahun 2019-2022

Kemantren	2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Tegalrejo	37.164	8,98%	34.619	9,27%	34.826	9,25%	35.018	9,24%
Jetis	27.132	6,55%	23.385	6,26%	23.525	6,25%	23.655	6,24%
Gondokusuman	42.818	10,34%	36.921	9,88%	37.142	9,87%	37.347	9,86%
Danurejan	21.335	5,15%	18.670	5,00%	18.814	5,00%	18.950	5,00%
Gedongtengen	19.891	4,80%	16.484	4,41%	16.582	4,41%	16.674	4,40%
Ngampilan	18.550	4,48%	15.358	4,11%	15.450	4,11%	15.535	4,10%
Wirobrajan	27.868	6,73%	24.739	6,62%	24.887	6,61%	25.024	6,60%
Mantrijeron	35.433	8,56%	33.340	8,92%	33.748	8,97%	34.146	9,01%



Kemantren	2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Kraton	21.831	5,27%	17.943	4,80%	18.097	4,81%	18.244	4,81%
Gondomanan	14.982	3,62%	12.793	3,42%	12.869	3,42%	12.941	3,42%
Pakualaman	10.810	2,61%	9.148	2,45%	9.203	2,45%	9.254	2,44%
Mergangsan	32.043	7,74%	28.739	7,69%	28.911	7,68%	29.071	7,67%
Umbulharjo	69.887	16,88%	68.170	18,25%	68.576	18,22%	68.957	18,20%
Kotagede	34.311	8,29%	33.280	8,91%	33.694	8,95%	34.097	9,00%
Kota Yogyakarta	414.055	100,00%	373.589	100,00%	376.324	100,00%	378.913	100,00%

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020-2023

Berdasarkan jumlah Penduduk tersebut, dapat dihitung laju pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta setiap tahunnya. Pada tabel 2.1.2. disajikan laju pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2019-2022. Laju pertumbuhan Penduduk pada tahun 2020-2021 dan 2021-2022 diperoleh melalui BPS Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka. Sementara itu, laju pertumbuhan Penduduk tahun 2018-2019 diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan tim dengan menggunakan metode geometrik.

Laju pertumbuhan Penduduk berada pada angka negatif pada tahun 2018-2019 dan 2019-2020 penurunan jumlah Penduduk. Pada tahun 2018, jumlah Penduduk sebesar 427.498 jiwa kemudian menurun menjadi 414.055 jiwa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menurun menjadi 373.589 jiwa atau sebesar -9,77% dari jumlah tahun 2019. Laju pertumbuhan kembali positif pada tahun 2020-2021 yang meningkat 0,98% dan 2021-2022 meningkat 0,69%.

Tabel 2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Keterangan	Tahun		
	2010-2020	2020-2021	2021-2022
Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	-0,38	0,98	0,69

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021 dan 2023

Dinamika perkembangan jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Tabel 2.1.3 menyajikan jumlah kelahiran dan kematian yang terlapor tahun 2019-2021 di Kota Yogyakarta. Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2019 sebesar 3.338 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 4.184 jiwa pada tahun 2020, dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 3.957 jiwa. Kematian pada tahun 2019 berjumlah 3.669 jiwa yang kemudian menurun menjadi 3.230 jiwa pada tahun 2020. Jumlah kematian melonjak pada tahun 2021 sebesar 5.364 jiwa. Peningkatan jumlah kematian ini dipengaruhi oleh



pandemi COVID-19 yang mencapai puncak gelombang 2 pada bulan Juni-Desember 2021. Pada tahun 2022, jumlah kematian kembali mengalami penurunan menjadi 3.733 jiwa.

Tabel 2.1.3 Jumlah Kelahiran dan Kematian di Kota Yogyakarta, 2019-2022*

Kecamatan	Kelahiran				Kematian			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Tegalrejo	367	375	373	358	327	250	454	319
Jetis	201	271	216	222	274	235	387	264
Gondokusuman	292	411	366	350	358	342	526	398
Danurejan	108	176	201	174	202	192	281	172
Gedongtengen	107	168	172	128	186	194	263	208
Ngampilan	141	192	175	160	175	157	277	163
Wirobrajan	294	295	292	247	265	214	383	253
Mantrijeron	305	361	354	320	316	264	528	345
Kraton	115	200	179	172	235	183	309	217
Gandomanan	140	166	117	133	137	141	229	176
Pakualaman	70	96	87	74	108	84	152	112
Mergangsan	206	324	303	271	254	276	425	279
Umbulharjo	600	767	754	693	562	461	758	590
Kotagede	392	382	368	356	270	237	392	237
Kota Yogyakarta	3.338	4.184	3.957	3.658	3.669	3.230	5.364	3.733

*Data kelahiran dan kematian berdasarkan catatan terlapor

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019-2022

2.1.5.2. Struktur Usia dan Jenis Kelamin

Penduduk menurut kelompok umur dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu Penduduk belum produktif (usia kurang dari 15 tahun), Penduduk produktif (15-64 tahun), dan Penduduk sudah tidak produktif (usia lebih dari 64 tahun). Penduduk belum produktif dan sudah tidak produktif dapat disebut sebagai Penduduk tidak produktif. Data jumlah Penduduk pada masing-masing kategori dapat digunakan untuk mengetahui rasio ketergantungan, yaitu perbandingan antara jumlah Penduduk tidak produktif dan jumlah Penduduk produktif.

Tabel 2.1.4 menyajikan variasi jumlah Penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2019-2022. Penduduk di Kota Yogyakarta memiliki jumlah kelompok usia produktif yang lebih tinggi daripada kelompok usia non produktif. Pada kelompok umur produktif, rentang usia 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan 25-29 tahun memiliki jumlah Penduduk tertinggi di antara



kelompok usia lainnya. Pada kelompok umur 0-4 tahun, jumlah Penduduk mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian meningkat kembali pada 2021 dan 2022. Tren ini berbeda dengan kelompok umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun yang menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga 2022.

Pada kelompok usia produktif, yaitu rentang 15-64 tahun, mengalami dinamika penurunan dan peningkatan jumlah Penduduk. Pada tahun 2020, jumlah Penduduk usia produktif mengalami penurunan kecuali pada rentang usia 20-24 tahun. Masing-masing kelompok umur mengalami penambahan jumlah pada tahun 2021 dan 2022, kecuali pada kelompok umur 35-39 tahun dan 40-44 tahun yang tetap mengalami penurunan. Pada kelompok umur 20-24 tahun, menunjukkan tren peningkatan jumlah Penduduk di setiap tahun. Pada kelompok Penduduk tidak produktif, yaitu di atas 64 tahun, menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2022. Penduduk dalam kelompok umur di atas 75 tahun mengalami penurunan tahun 2020 dan kembali meningkat tahun 2021 dan 2022. Dalam dokumen ini, terdapat dua jenis pengelompokan usia lansia. Untuk menghitung angka ketergantungan, usia Penduduk non produktif yang digunakan yaitu Penduduk usia di atas 64 tahun. Sementara dalam menghitung proporsi Penduduk lansia, batas usia yang digunakan yaitu di atas 60 tahun. Penggunaan batas usia di atas 60 tahun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dalam peraturan tersebut didefinisikan bahwa lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.

Tabel 2.1.4 menunjukkan pada tahun 2019 jumlah Penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sementara pada tahun-tahun berikutnya, jumlah Penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.



Tabel 2.1.4 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2019-2022

Kelompok Umur	2019			2020			2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0 - 4	13.050	12.225	35.433	11.569	11.126	33.340	11.658	11.208	33.748	11.761	11.305	34.146
5 - 9	15.145	14.646	21.831	12.297	11.977	17.943	12.215	11.883	18.097	12.150	11.799	18.244
10 - 14	16.128	15.415	32.043	13.029	12.642	28.739	12.937	12.547	28.911	12.836	12.450	29.071
15 - 19	16.929	16.250	69.887	14.903	14.568	68.170	15.035	14.710	68.576	15.123	14.802	68.957
20 - 24	15.453	15.246	34.311	15.947	16.154	33.280	16.272	16.576	33.694	16.548	16.941	34.097
25 - 29	14.777	15.325	42.818	14.985	14.385	36.921	14.992	14.412	37.142	15.074	14.527	37.347
30 - 34	14.096	14.973	21.335	14.057	13.957	18.670	14.095	13.972	18.814	14.115	13.979	18.950
35 - 39	16.339	16.713	10.810	13.411	13.608	9.148	13.361	13.552	9.203	13.339	13.522	9.254
40 - 44	15.183	16.207	14.982	13.076	14.039	12.793	13.042	13.960	12.869	12.971	13.849	12.941
45 - 49	14.531	15.578	18.550	12.596	13.513	15.358	12.625	13.521	15.450	12.671	13.542	15.535
50 - 54	13.726	15.557	27.868	11.557	13.049	24.739	11.600	13.087	24.887	11.606	13.076	25.024
55 - 59	11.965	13.579	19.891	11.001	12.328	16.484	11.185	12.531	16.582	11.361	12.722	16.674
60 - 64	9.894	11.347	27.132	8.906	10.234	23.385	9.096	10.503	23.525	9.266	10.746	23.655
65 - 69	6.734	7.702	37.164	6.786	8.561	34.619	6.985	8.814	34.826	7.191	9.083	35.018
70 - 74	3.380	4.517	414.055	4.173	5.065	373.589	4.302	5.209	376.324	4.429	5.350	378.913
75+	4.208	7.237	35.433	3.726	6.364	33.340	3.851	6.588	33.748	3.971	6.808	34.146
Total	201.538	212.517	21.831	182.019	191.570	17.943	183.251	193.073	18.097	184.412	194.501	18.244

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2020-2023



Tabel 2.1.5 berikut menampilkan rasio ketergantungan (*dependency ratio/DR*) Kota Yogyakarta tahun 2019-2022. Apabila nilai angka ketergantungan menurun, menunjukkan bahwa jumlah Penduduk usia non produktif yang ditanggung Penduduk usia produktif mengalami penurunan. Rasio ketergantungan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 40,30% sedangkan sebelumnya sebesar 40,99% pada tahun 2019. Akan tetapi rasio ketergantungan mengalami peningkatan kembali menjadi 40,35% pada tahun 2021 dan 40,45% pada tahun 2022. Peningkatan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa jumlah Penduduk usia non produktif yang ditanggung Penduduk usia produktif bertambah.

Tabel 2.1.5 Rasio Ketergantungan (DR) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Ket	2019	2020	2021	2022
0-14	86.609	72.640	72.448	72.301
15-64	293.668	266.274	268.127	269.780
>64	33.778	34.675	35.749	36.832
DR (%)	40,99	40,30	40,35	40,45

Sumber: diolah dari BPS Kota Yogyakarta, 2020-2023

2.2.1.3. Determinan Fertilitas

Tingkat Kesuburan Umum/*Total Fertility Rate*

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15-49 tahun. Tingkat kesuburan umum mengalami penurunan 2021. Pada tahun 2020, TFR sebesar 1,67 kemudian menurun menjadi 1,53 pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022.

Tingkat Kelahiran Kasar / *Crude Birth Rate (CBR)*

Tabel 2.1.6 berikut menampilkan data jumlah kelahiran dan angka kelahiran kasar pada tahun 2019-2022 di Kota Yogyakarta. Angka kelahiran kasar merupakan jumlah bayi lahir di setiap 1000 Penduduk. Pada tahun 2020, angka kelahiran kasar meningkat menjadi 10,08 sementara pada tahun 2019 sebesar 8,07. Pada tahun 2021 dan 2022, angka kelahiran kasar kembali menurun menjadi 9,52 pada tahun 2021 dan 8,83 pada tahun 2022.

Tabel 2.1.6 Jumlah Kelahiran dan CBR Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kelahiran	CBR	TFR
2019	3.338	8,07	-
2020	4.184	10,08	1,67



Tahun	Jumlah Kelahiran	CBR	TFR
2021	3.957	9,52	1,53
2022	3.685	8,83	1,67

Sumber: (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019-2022; BKKBN Provinsi DIY, 2023

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur

Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) merupakan jumlah kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu. Pada tabel 2.1.7 berikut kelompok umur yang digunakan yaitu kelompok umur 15-19 tahun. Nilai ASFR pada tahun 2018 sebesar 3,79 artinya setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun terdapat 3-4 bayi yang dilahirkan. Angka ASFR ini menurun pada tahun 2019 menjadi 1,74; kemudian meningkat tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 nilai ASFR sebesar 2,1; tahun 2021 meningkat menjadi 3,4. Nilai ASFR kembali menurun tahun 2022 menjadi 1,5. Berdasarkan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, peningkatan dan penurunan ASFR pada anak usia 15-19 tahun disebabkan oleh faktor pernikahan usia muda, peran orang tua dalam mengontrol pergaulan anak, serta pendidikan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan Usia Perkawinan.

Tabel 2.1.7 ASFR di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Kelompok umur	2018	2019	2020	2021	2022
15-19 tahun	3,79	1,74	2,1	3,4	1,5

Sumber: Hasil Olahan DP3AP2KB Kota Yogyakarta (2022)

Angka Kematian Kasar / *Crude Death Rate (CDR)*

Angka Kematian Kasar merupakan angka kematian yang terjadi setiap 1.000 Penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019, Angka Kematian Kasar di Kota Yogyakarta sebesar 8,87, artinya dalam 1.000 Penduduk terjadi kurang lebih 8 kematian. Angka Kematian Kasar mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 7,78 yang kemudian kembali meningkat tahun 2021 menjadi 12,9. Pada tahun 2022 menurun menjadi 8,87. Peningkatan angka kematian tahun 2021 serta penurunannya pada tahun 2022 menarik untuk dicari tahu lebih dalam terkait faktor penyebabnya.

Tabel 2.1.8 Angka Kematian Kasar Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Ket	2018	2019	2020	2021	2022
CDR	8,87	8,87	7,78	12,9	8,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018-2022



Cakupan Peserta KB Aktif

Tabel 2.1.9 berikut menyajikan data cakupan peserta KB aktif pada tahun 2019-2021. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan perbandingan peserta KB baru dan lama yang menggunakan alat kontrasepsi dengan jumlah pasangan usia subur dalam waktu tertentu. Angka cakupan KB aktif mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 65,46% sedangkan sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 69,93%. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 68,57% kemudian meningkat kembali tahun 2022 menjadi 74,04%.

Tabel 2.1.9 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta KB aktif	30.347	24.799	23.597	27.306
Jumlah pasangan usia subur	38.951	33.878	34.414	36.882
Cakupan peserta KB aktif (%)	77,91	73,2	68,57	74,04

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2023

Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun. Pada tabel berikut ditampilkan persentase perkawinan usia anak pada tahun 2018-2022. Perkawinan pada usia anak kurang dari 15 tahun mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, yang mencapai 2,42% tahun 2021. Kemudian mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 1,4%. Perkawinan pada usia anak 16 tahun pada 2018 sebesar 2,3% yang kemudian menurun tahun 2019 menjadi 1,51%. Persentase perkawinan kembali meningkat di tahun berikutnya hingga mencapai 2,86% pada tahun 2022. Pada anak usia 17-18 tahun, perkawinan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 5,57% kemudian meningkat tahun 2020 menjadi 10,5% dan kembali menurun tahun 2021 menjadi 7,57%. Akan tetapi persentase perkawinan pada kelompok usia ini kembali meningkat tahun 2022 menjadi 9,06%.

Tabel 2.1.10 Persentase Perkawinan Usia Anak (%)

Tahun	<15 tahun	16 tahun	17-18 tahun
2018	1,76	2,3	10,29
2019	1,61	1,51	5,57
2020	2,41	1,87	10,5
2021	2,42	2,52	7,57
2022	1,4	2,86	9,06

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023



2.1.2. Kualitas Penduduk

2.1.2.1. Kualitas Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur menggunakan tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak; yang terdiri dari empat indikator yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Nilai IPM Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan tren yang meningkat dalam kurun waktu 2018-2022. Nilai IPM sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 86,61 sementara pada tahun sebelumnya bernilai 86,65. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat menjadi 87,18 dan 87,69. Nilai IPM ini lebih tinggi daripada IPM Provinsi DIY yang pada tahun 2022 sebesar 80,64 (BPS, 2022).

Tabel 2.1.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
IPM	86,11	86,65	86,61	87,18	87,69

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur menggunakan dimensi yang sama dengan IPM namun dengan disparitas antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi nilai IPG harus mengacu pada capaian nilai IPM karena keduanya sangat terkait. Berdasarkan tabel 2.1.12 dapat diidentifikasi bahwa capaian IPG Kota Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 98,09 dan meningkat pada periode 2020-2022. Hal ini berarti capaian pembangunan manusia di Kota Yogyakarta semakin merata secara jenis kelamin sehingga kesetaraan gender dalam pembangunan semakin meningkat.

Tabel 2.1.12 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
IPG	98,48	98,09	98,16	98,32	98,48

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

2.1.2.2. Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan proporsi anak yang bersekolah menurut kelompok usia. APS yang mendekati 100 mengindikasikan bahwa pencapaian partisipasi sekolah semakin baik. Berdasarkan, partisipasi sekolah anak berusia 7-12 tahun atau jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 99,82%.



Apabila dibandingkan dengan dokumen GDPK sebelumnya yang menyajikan data APS tahun 2014-2016, angka partisipasi sekolah tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2014-2016, anak usia 7-12 tahun memiliki nilai 100% yang artinya 100% anak pada usia tersebut sudah bersekolah. Temuan ini menarik untuk ditelisik lebih lanjut mengenai faktor penyebab penurunan angka partisipasi sekolah.

Selain anak usia 7-12 tahun, penurunan APS juga terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun atau jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun 2015-2016, partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun mencapai 100%, yang kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 99,43%. Pada tahun 2019-2021 APS kelompok umur tersebut mengalami peningkatan mencapai 99,92% pada tahun 2021. Akan tetapi kembali menurun di tahun 2022 menjadi 99,32%.

Angka Partisipasi Sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun atau jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2019 sebesar 97,72%, kemudian meningkat menjadi 99,62% pada tahun 2020. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 96,81% dan tahun 2022 sebesar 96,73%. Penurunan angka partisipasi sekolah juga ditunjukkan oleh kelompok usia 19-24 tahun atau jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2019 sebesar 69,07%, kemudian menurun menjadi 68,67% pada tahun 2020, dan 68,01% pada tahun 2021. Di tahun 2022, partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi mengalami peningkatan pesat menjadi 75,41%.

Tabel 2.1.13 Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022 (%)

Kelompok umur	2019	2020	2021	2022
7 – 12	99,8	99,93	99,82	99,93
13 – 15	99,43	99,62	99,92	99,32
16 – 18	97,72	99,26	96,81	96,73
19 – 24	69,07	68,67	68,01	75,41

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi siswa pada jenjang pendidikan atau kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat sesuai umurnya. Nilai APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah sesuai dengan jenjangnya, dengan nilai ideal 100%. Tren APM



mengalami kenaikan dari tahun 2018-2022 pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada jenjang SMA/Sederajat, APM mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan 2022.

Tabel 2.1.14 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (%)

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	98,40	99,80	99,79	99,66	99,93
SMP/MTs	73,65	73,90	75,56	76,25	80,49
SMA/SMK/MA	72,60	72,19	72,32	73,25	73,02

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan siswa pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya dengan Penduduk usia sekolah. APK digunakan untuk melihat tingkat partisipasi Penduduk secara umum terhadap jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi nilai APK menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. APK Kota Yogyakarta tahun 2022 mengalami peningkatan pada jenjang SD dengan nilai 107,09%. Pada jenjang SMP dan SMA mengalami penurunan pada tahun 2022.

Apabila dilihat tren perubahan dari tahun 2018-2022, nilai APK mengalami fluktuasi perubahan. Seperti pada jenjang SD/MI yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, 2020 dan 2021; jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021; serta jenjang SMA/SMK/MA yang meningkat tahun 2019 dan 2021 (Tabel 2.1.15).

Tabel 2.1.15 Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (%)

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	103,7	106,3	105,4	105,3	107,0
SMP/MTs	81,51	77,88	82,75	87,18	80,49
SMA/SMK/MA	107,8	103,1	102,9	108,5	103,1

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 2.1.16 di bawah menampilkan rata-rata lama sekolah Penduduk pada tahun 2018-2022. Angka tersebut mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya dan mencapai 11,89 pada tahun 2022. Peningkatan ini



diantaranya dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat dan kemudahan akses untuk menempuh pendidikan. Jika melihat data pada dokumen GDPK sebelumnya, angka rata-rata lama sekolah secara konsisten menunjukkan peningkatan.

Tabel 2.1.16 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (tahun)

Ket	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,44	11,45	11,46	11,72	11,89
Angka Harapan Lama Sekolah	17,05	17,28	17,43	17,6	17,61

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah anak-anak di Kota Yogyakarta juga mengalami peningkatan (tabel 2.1.16). Pada tahun 2022, anak-anak memiliki harapan menikmati pendidikan selama 17,61 tahun.

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah persentase putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2021, angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMA/SMK/MA meningkat menjadi 0,01% dan 0,3%. Pada jenjang SMP/MTS persentase angka putus sekolah berada pada angka yang sama dari tahun 2019-2021. Penyebab angka putus sekolah SMA/SMK/MA yaitu alasan bekerja, menikah, permintaan orang tua, dan lain-lain.

Tabel 2.1.17 Angka Putus Sekolah Tahun 2019-2021 di Kota Yogyakarta (%)

Kelompok umur	2019	2020	2021
SD/MI	0,01	0	0,01
SMP/MTs	0,02	0,02	0,02
SMA/SMK/MA	0,04	0,05	0,30

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022 dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Angka Putus Sekolah formal berhubungan dengan jumlah peserta pada pendidikan non formal yang mengambil Paket A/SD, Paket B/SMP, dan Paket C/SMA. Jumlah peserta didik yang mengambil Paket C atau setara SMA lebih banyak daripada peserta yang mengambil Paket A/SD dan Paket B/SMP. Pada tahun 2023, peserta yang mengambil Paket C/SMA sebanyak 118 peserta dengan rincian peserta berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 82 siswa dan peserta berusia lebih dari 25 tahun sebanyak 36 siswa.



Tabel 2.1.18 Data Anak Pindah/Putus Sekolah Terdaftar di Paket A/B/C di Kota Yogyakarta Tahun 2023

Keterangan	2023
Paket A/SD	8
Paket B/SMP	43
Paket C/SMA	118

Sumber: UPT SPNF SKB Kota Yogyakarta, 2023

Data Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta

Di Kota Yogyakarta, jumlah sekolah dasar negeri lebih banyak daripada sekolah dasar swasta. Terdapat 89 sekolah dasar negeri dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, serta terdapat 76 sekolah dasar swasta pada tahun ajaran 2022/2023. Berbanding terbalik dengan jumlah sekolah, jumlah murid di sekolah dasar swasta lebih banyak daripada di sekolah dasar negeri. Baik di sekolah dasar negeri maupun swasta, perubahan jumlah murid menunjukkan tren yang menurun pada tahun ajaran 2019/2020 hingga 2022/2023. Pada tahun ajaran 2019/2020, total murid di sekolah dasar negeri sebanyak 20.729 siswa sementara pada tahun ajaran 2022/2023 berjumlah 18.739 siswa. Penurunan ini terjadi di seluruh kemantren kecuali di Kemantren Ngampilan, Wirobrajan dan Gedongtengen yang meningkat pada tahun ajaran 2022/2023. Total murid di sekolah dasar swasta tahun 2019/2020 sebanyak 21.456 siswa serta tahun 2022/2023 berjumlah 19.771 siswa. Pada tahun ajaran 2022/2023, hanya Kemantren Mantriweron dan Danurejan yang mengalami peningkatan murid sekolah dasar swasta.

Tabel 2.1.19 Jumlah Murid Sekolah Dasar Negeri & Swasta di Kota Yogyakarta

Kemantren	2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Mantriweron	1.224	779	1.167	781	1.074	744	1.016	858
Kraton	1.740	-	1.666	-	1.581	-	1.537	-
Mergangsan	1.684	1.126	1.614	1.094	1.556	988	1.505	915
Umbulharjo	3.039	3.837	2.954	3.846	2.831	3.756	2.770	3.724
Kotagede	2.627	1.381	2.581	1.379	2.519	1.331	2.501	1.287
Gondokusuman	2.459	4.582	2.384	4.372	2.342	4.287	2.252	4.157
Danurejan	1.358	288	1.285	308	1.232	309	1.210	315
Pakualaman	452	654	391	642	331	584	299	564
Gondomanan	402	1.862	379	1.770	368	1.669	350	1.554
Ngampilan	220	1.747	212	1.776	210	1.704	212	1.684
Wirobrajan	1.180	1.599	1.142	1.590	1.101	1.500	1.110	1.498
Gedongtengen	373	493	336	424	310	366	336	316
Jetis	1.565	1.888	1.497	1.911	1.454	1.801	1.442	1.743



Kemantren	2019/2020		2020/2021		2021/2022		2022/2023	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Tegalrejo	2.406	1.220	2.322	1.247	2.249	1.225	2.199	1.156
Total	20.729	21.456	19.930	21.140	19.158	20.264	18.739	19.771

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021-2023

2.1.2.3. Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup ditahun tertentu. Angka kematian bayi berfluktuasi pada periode 2018-2021. Pada tahun 2021, AKB menurun menjadi 10,88. Di antara penyebab kematian bayi yaitu karena BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), pneumonia, asfiksia, kelainan jantung bawaan, sepsis, dan lain-lain.

Tabel 2.1.20 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (Akaba) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	9,76	7,18	11,22	10,88	10,80
Angka kematian balita (per 1000 kelahiran hidup)*	1,76	0,31	1,65	0,13	1,25
Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	111,5	119,8	64,14	580,34	160,06

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2021-2023; *Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diambil dari Profil Kependudukan Kota Yogyakarta, 2018-2022

Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (Akaba) merupakan jumlah kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai angka 1,65 (tabel 2.1.20).

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung dari jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, AKI sebesar 119,8 yang kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 64,14. Secara kuantitas, pada tahun 2018-2020, setiap tahunnya terdapat 4 kasus kematian ibu. Akan tetapi pada tahun 2021, angka kematian ibu meningkat drastis menjadi 580,34 atau terdapat 16 kasus. Pada tahun 2022 kasus kematian ibu kembali menurun menjadi 160,06 per 100.000 kelahiran hidup atau terdapat



4 kasus. Penyebab terjadinya kematian ibu yaitu terjadi pendarahan, penyakit jantung, dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2021.

Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan

Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong tenaga kesehatan baik oleh bidan, dokter, dan tenaga medis lainnya (Kementerian Kesehatan, 2012). Standar pelayanan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Jumlah kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan mengalami tren penurunan sejak tahun 2019-2022. Banyaknya kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan tahun 2022 sebesar 2.495 kelahiran.

Tabel 2.1.21 Banyaknya Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Banyaknya Kelahiran
2018	3.610
2019	3.343
2020	3.318
2021	2.757
2022	2.495

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu menunjukkan jumlah posyandu yang melayani per 1.000 balita. Jumlah balita yang tertera yaitu anak berusia 0-4 tahun. Rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 27,49, sementara pada tahun 2019 sebesar 24,57. Artinya pada tahun 2020 terdapat 27 posyandu yang melayani 1000 balita sedangkan pada tahun 2019 terdapat 24 posyandu yang melayani 1000 balita. Pada tahun 2021 dan 2022, rasio posyandu mengalami penurunan yang disebabkan oleh kenaikan jumlah balita sedangkan jumlah posyandu tetap.

Tabel 2.1.22 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
Jumlah posyandu	Unit	621	624	624	624
Jumlah balita	Anak	25.275	22.695	22.866	23.066
Rasio posyandu per satuan balita	Unit/Anak	24,57	27,50	27,29	27,05

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2023



Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk

Dokter pada tabel berikut meliputi dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Rasio dokter per satuan Penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan perlahan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2019, rasio dokter sebesar 2,22 kemudian meningkat menjadi 2,98 pada tahun 2020. Artinya terdapat 2 dokter disetiap 1000 Penduduk. Penurunan rasio disebabkan oleh penurunan jumlah dokter sedangkan jumlah Penduduk meningkat.

Tabel 2.1.23 Rasio Tenaga Medis terhadap Jumlah Penduduk

Indikator	2019	2020	2021	2022
Jumlah Dokter	918	1.112	1.071	1.039
Jumlah Perawat	2.271	2.360	2.438	2.369
Jumlah Bidan	308	367	360	312
Jumlah Penduduk	414.055	373.589	376.324	378.913
Rasio dokter per seribu Penduduk	2,22	2,98	2,85	2,74
Rasio perawat per satuan Penduduk	5,48	6,32	6,48	6,25
Rasio bidan per satuan Penduduk	0,744	0,982	0,957	0,823

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2023

Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio perawat per satuan Penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2019, rasio perawat sebesar 5,48 yang artinya setiap 1000 Penduduk terdapat 5 perawat. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 6,32 dan tahun 2021 sebesar 6,48. Kenaikan rasio perawat per satuan Penduduk tahun 2020 karena jumlah Penduduk yang menurun dari tahun sebelumnya sedangkan jumlah perawat meningkat.

Rasio bidan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,98 sementara pada tahun 2019 sebesar 0,74. Pada tahun 2021 rasio bidan per satuan Penduduk mengalami penurunan menjadi 0,957 begitu pula tahun 2022 menjadi 0,823. Kenaikan rasio bidan tahun 2020 disebabkan jumlah Penduduk yang menurun sementara jumlah bidan bertambah. Penurunan rasio pada tahun berikutnya disebabkan oleh jumlah bidan yang berkurang sedangkan jumlah Penduduk bertambah.



Angka Gizi Buruk

Persentase gizi buruk mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, meningkat pada tahun 2020 mencapai angka 1,3% dan kemudian menurun perlahan hingga mencapai angka 0,55% pada tahun 2022. Sebagian besar Penduduk Kota Yogyakarta berada pada status gizi normal atau gizi baik. Persentase ini sempat menurun pada tahun 2020 dan 2021, dan kembali meningkat mencapai 8,41% pada tahun 2022. Persentase Penduduk dengan gizi kurang tahun 2022 juga mengalami peningkatan mencapai 6,18%. Perlu dilakukan penanganan terhadap Penduduk dengan gizi kurang tersebut sehingga persentasenya bisa menurun.

Tabel 2.1.24 Persentase Balita Menurut Status Gizi Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Gizi buruk	0,92	0,88	1,30	0,90	0,55
Gizi kurang	7,61	7,58	5,80	5,60	6,18
Gizi normal	87,80	88,27	75,80	77,60	81,41
Gizi lebih	3,67	3,27	17,10	15,80	11,86

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022

Tabel 25 menyajikan persentase balita menurut indikator berat badan tahun 2019-2022. Persentase berat badan sangat kurang mengalami penurunan mulai tahun 2020 hingga 2022. Sementara itu persentase berat badan kurang mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 10,41%.

Tabel 2.1.25 Persentase Balita Menurut Indikator Berat Badan Tahun 2019-2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Berat badan sangat kurang	0,53	1,74	1,57	1,52
Berat badan kurang	4,58	9,00	8,98	10,41
Berat badan normal	88,90	78,65	79,49	80,34
Risiko berat badan lebih	5,99	10,60	9,96	7,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020-2023

Angka Kasus Stunting

Angka *stunting* di Kota Yogyakarta mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data pada dokumen GDPK sebelumnya. Pada tahun 2017, persentase balita *stunting* mencapai 23%, yang kemudian mulai menurun pada tahun 2018. Terjadi sedikit peningkatan persentase balita *stunting* pada tahun 2020 menjadi 14,36%, akan tetapi kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai 10,8% di tahun 2022. Capaian penurunan ini diharapkan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.



Tabel 2.1.26 Persentase Balita *Stunting* Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase balita <i>stunting</i>	12,83	11,31	14,36	12,88	10,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Pada tahun 2022, AHH laki-laki mencapai usia 72,95 tahun serta AHH perempuan mencapai usia 76,42 tahun. Peningkatan ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perekonomian masyarakat, keadaan lingkungan, peningkatan kualitas hidup, dan sebagainya.

Tabel 2.1.27 Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018-2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
2018	72,56	76,34
2019	72,67	76,35
2020	72,78	76,37
2021	72,92	76,4
2022	72,95	76,42

Sumber: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Rumah Tangga ber-PHBS

Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan individu, atau kelompok masyarakat dapat menolong dirinya sendiri secara mandiri dalam bidang kesehatan dan berperan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan No. 2269/MENKES/PER/XI/2011). Terdapat beberapa indikator untuk melihat capaian rumah tangga yang ber-PHBS di Kota Yogyakarta yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tahun 2018 dan tahun 2019, penentuan rumah tangga PHBS menggunakan 10 indikator yaitu persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari dan tidak merokok di dalam rumah. Sedangkan data tahun 2020 hingga 2023 menggunakan 13 indikator dengan menambahkan 3



indikator baru yaitu melaksanakan pengelolaan limbah cair, melakukan pemilahan sampah dan rumah tangga melakukan pengelolaan air minum dan makanan. Beberapa indikator mengalami dinamika yang bervariasi ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan. Berikut disajikan Tabel persentase rumah tangga ber-PHBS.

Tabel 2.1.28 Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

No	Indikator PHBS	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Rumah tangga yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan	99,49	98,60	100,00	97,47	100,00
2	Rumah tangga yang memberikan ASI Eksklusif	80,86	81,29	75,00	64,23	67,62
3	Rumah tangga yang menimbang balita setiap bulan	93,63	94,48	94,10	84,95	95,72
4	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	99,01	95,63	99,30	99,01	98,12
5	Rumah Tangga yang Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun	95,10	94,97	100	99,80	98,98
6	Rumah Tangga yang Melakukan Pengeloaan Air Minum dan Makanan	-	-	100	99,53	95,09
7	Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sehat (STOP BABS)	97,44	96,08	99,60	77,74	99,67
8	Rumah Tangga yang Melakukan Pengelolaan Limbah Cair	-	-	90,70	91,59	98,19
9	Rumah Tangga yang Melakukan Pemilahan Sampah	-	-	44,30	70,99	78,49
10	Rumah Tangga yang Memberantas Jentik	96,16	95,56	99,60	86,02	99,32



No	Indikator PHBS	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
11	Rumah Tangga yang Mengonsumsi Buah dan Sayur	95,44	92,02	81,70	91,22	95,09
12	Rumah Tangga yang Melakukan Aktifitas Fisik	82,48	78,37	85,70	86,18	93,46
13	Rumah Tangga yang Tidak Merokok di Dalam Rumah	63,48	62,59	47,60	58,07	26,94
14	Rumah Tangga ber-PHBS	51,32	50,75	28,57	35,58	57,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2019-2023

Pengendalian Penyakit

Kasus Diare

Diare adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada usus khususnya usus halus. Diare menyebabkan penderita mengalami Buang Air Besar (BAB) yang berlebihan. Kasus diare di Kota Yogyakarta mengalami dinamika yang beragam. Pada tahun 2018 angka diare mencapai 9.757 kasus dan jumlah ini mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 hingga 2021 yang berkurang kurang lebih 50%. Penurunan ini tidak terlepas dari pandemi Covid 19 yang terjadi yang menyebabkan penurunan mobilitas orang baik menuju pelayanan kesehatan atau ke tempat yang lainnya. Namun demikian, kasus diare kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 5.907 kasus dimana kondisi pandemi sudah semakin membaik sehingga orang-orang sudah kembali melakukan mobilitas. Berikut disajikan Tabel kasus diare di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1.29 Jumlah Kasus Diare Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022.

Tahun	Kasus Diare
2018	9.757
2019	9.463
2020	5.228
2021	3.951
2022	5.907

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023

Kasus Tuberkulosis (TB)

Kasus tuberkulosis di Kota Yogyakarta dilaporkan dalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). Jumlah kasus yang terdapat dalam SITB terdiri dari Penduduk yang mempunyai alamat domisili di Kota Yogyakarta dan tidak memiliki alamat domisili di Kota Yogyakarta. Jumlah kasus yang mempunyai



alamat tinggal di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 604 kasus. Kemudian menurun menjadi 429 kasus pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 477 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah kasus TB yang diketahui sebesar 805 kasus. Peningkatan penemuan kasus TB pada tahun 2022 dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemi COVID-19 yang berangsur normal sehingga kegiatan investigasi kontak dan *Active Case Finding* (ACF) berjalan dengan optimal dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.1.30 Jumlah Kasus Tuberkulosis

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Kasus TB yang tercatat di SITB	1.098	833	879	1.355
Kasus TB dengan alamat domisili Kota Yogyakarta (tercatat di SITB)	604	429	477	805

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023

Kasus HIV

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sistem imunitas sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV dapat menular melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti melalui darah, ASI, dan cairan kelamin (Kemenkes, 2022). Apabila tidak ditangani dengan cepat, HIV dapat berkembang menjadi AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dari virus tersebut. Jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Yogyakarta banyak terjadi pada laki-laki, terutama dalam rentang usia 20-29 tahun. Pesentase persebaran HIV pada laki-laki sebesar 70,63% sedangkan pada perempuan sebesar 28,22%. Jumlah kasus HIV di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 123 kasus, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 36 kasus dan tahun 2021 sebanyak 62 kasus. Jumlah kasus kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 114 kasus.

Tabel 2.1.31 Jumlah Kasus HIV dan AIDS

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
HIV	104	123	36	62	114
AIDS	4	6	11	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023



Kasus Hipertensi

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang menyebabkan terhambatnya suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa darah ke jaringan tubuh lainnya. Pada tahun 2018, jumlah penderita hipertensi yang terlayani sesuai standar sebanyak 18.057 orang, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 26.400 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi COVID-19 sehingga kunjungan ke fasilitas kesehatan berkurang. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar tahun 2020 sebanyak 21.817 orang, tahun 2021 sebanyak 26.720 orang, dan tetap meningkat pada tahun 2022 menjadi 28.420 orang.

Tabel 2.1.32 Distribusi Pelayanan Hipertensi dan Diabetes Melitus di Kota Yogyakarta

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Hipertensi	18.057	26.400	21.817	26.720	28.420
Diabetes melitus	7.467	11.046	10.635	12.554	13.676

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023

Kasus Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi yang disertai gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Jumlah penderita diabetes melitus yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2022. Tahun 2018 berjumlah 7.467 orang, tahun 2019 meningkat menjadi 11.046, kemudian menurun menjadi 10.635 pada tahun 2020. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 12.554 orang dan tahun 2022 sebanyak 13.676 orang. Penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan karena penurunan kunjungan ke fasilitas kesehatan yang dipengaruhi pandemi COVID-19.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa klasifikasi, yaitu penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik; yang dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi dalam jangka waktu lama. Pada tahun 2022 tercatat ada 2.534 penyandang disabilitas tunggal, 490 penyandang disabilitas ganda, dan 92 penyandang disabilitas multi. Berdasarkan klasifikasinya, terdapat 618 penyandang disabilitas intelektual, 1.342 penyandang disabilitas fisik, 864 disabilitas sensorik, dan 989 penyandang disabilitas mental. Kemantren Umbulharjo memiliki jumlah terbanyak yaitu 533 penyandang disabilitas dan Kemantren Pakualaman dengan jumlah terkecil yaitu 123 penyandang disabilitas. Pada triwulan I



tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas yang tertangani sebanyak 23 orang dan pada triwulan II sebanyak 180 orang.

Tabel 2.1.33 Klasifikasi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta Tahun 2022

Kemantren	Klasifikasi			Total
	Tunggal	Ganda	Multi	
Mantrijeron	189	15	0	204
Kraton	155	25	5	185
Mergangsan	132	56	20	208
Umbulharjo	464	59	10	533
Kotagede	166	34	5	205
Gondokusuman	215	26	2	243
Danurejan	97	31	8	136
Pakualaman	87	31	5	123
Gondomanan	124	19	2	145
Ngampilan	128	22	3	153
Wirobrajan	227	66	10	303
Gedongtengen	156	15	0	171
Jetis	180	49	13	242
Tegalrejo	214	42	9	265
Total	2.534	490	92	3.116

Sumber: Walikota Yogyakarta, 2022

Penderita Gangguan Jiwa Berat

Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam perubahan perilaku serta menimbulkan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia (Kemenkes, 2020). Pelayanan kesehatan terhadap penderita ODGJ berat berupa pemeriksaan kesehatan jiwa dan rujukan apabila diperlukan. Dalam kurun waktu 2018-2022, pelayanan ODGJ berat di Kota Yogyakarta paling banyak pada tahun 2022 yaitu 1.201 orang. Tahun 2019 sebesar 1.168 orang, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 1.030 orang dan tahun 2021 sebesar 1.002 orang.

Tabel 2.1.34 Distribusi Pelayanan Kesehatan Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan ODGJ Berat	902	1.168	1.030	1.002	1.201

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2023



Pelayanan Kesehatan Pada Lansia

Skrining kesehatan pada lansia berupa skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Pelayanan skrining meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah; pemeriksaan gula darah, gangguan mental, gangguan kognitif, tingkat kemandirian usia lanjut; serta anamnesa perilaku beresiko. Capaian pelayanan skrining kesehatan pada usia lanjut sudah mencapai 100% pada tahun 2022.

Tabel 2.1.35 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Sasaran	54.224	14.287	39.668	36.014
Realisasi	22.410	14.287	33.257	36.014
Persentase Capaian	41,33%	100%	83,84%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020-2023

2.1.2.4. Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

PDRB Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2019-2022 dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha informasi dan komunikasi memiliki nilai PDRB tertinggi dibandingkan lapangan usaha lain di Kota Yogyakarta. Hal ini berarti lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan sektor unggulan di Kota Yogyakarta. Nilai PDRB informasi dan komunikasi pada tahun 2022 sebesar 5.561.744,7 juta rupiah dan nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sehingga sektor ini merupakan sektor yang terus bertumbuh. Sumbangan PDRB Kota Yogyakarta terhadap PDRB Provinsi DIY relatif sama setiap tahunnya yaitu berkisar 26,5%. Hal ini berarti Kota Yogyakarta memberikan kontribusi yang stabil untuk PDRB Provinsi DIY.

Tabel 2.1.36 PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2019-2022

Kategori PDRB	PDRB KOTA YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38.019,13	38.584,58	38.933,93	40.498,40



Kategori PDRB	PDRB KOTA YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
B. Pertambangan dan Penggalian	895,51	829,36	793,54	807,20
C. Industri Pengolahan	3.580.912,02	3.408.982,65	3.415.046,35	3.493.799,30
D. Pengadaan Listrik dan Gas	65.684,50	64.799,14	66.710,44	70.853,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.004,28	39.161,25	41.334,21	42.750,50
F. Konstruksi	2.064.286,48	1.729.234,54	1.870.604,70	195.813,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	1.937.551,14	1.820.883,20	1.852.360,95	1.895.655,20
H. Transportasi dan Pergudangan	1.050.362,92	896.351,91	945.830,93	1.101.777,88
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.396.160,52	2.629.879,21	2.772.280,21	3.177.642,40
J. Informasi dan Komunikasi	3.959.894,09	4.737.877,39	5.348.122,81	5.561.744,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.686.578,70	1.677.562,71	1.690.901,44	1.771.825,53
L. Real Estate	2.512.666,15	2.559.815,14	2.590.532,92	2.646.846,90
M,N. Jasa Perusahaan	338.813,41	279.764,66	302.952,59	325.005,50
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.400.059,60	2.344.071,02	2.386.389,08	2.459.616,50
P. Jasa Pendidikan	2.734.512,80	2.847.448,18	2.948.713,17	3.003.600,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.096.679,57	1.303.941,72	1.368.501,01	1.431.874,80
R,S,T,U. Jasa lainnya	783.205,63	635.304,51	750.076,55	883.087,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA YOGYAKARTA	27.685.286,45	27.014.491,16	28.390.084,82	29.863.199,67



Kategori PDRB	PDRB KOTA YOGYAKARTA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Juta Rupiah)			
	2019	2020	2021	2022
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI DIY	104.485.458	101.683.520	107.308.555	112.898.323
Sumbangan PDRB Kota Yogyakarta Terhadap PDRB Provinsi DIY	26,50%	26,57%	26,46%	26,45%

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2023b

Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan nilai pendapatan rata-rata Penduduk yang diperoleh dari hasil bagi PDRB dengan populasi. Berdasarkan tabel PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 dapat diketahui bahwa nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2020 yang bernilai 72.291.000 rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 13,13%. Data ini menunjukkan bahwa pendapatan Penduduk mengalami peningkatan.

Tabel 2.1.37 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*
PDRB per Kapita ADHK (ribu rupiah)	61.117	63.899	72.291	75.493	78.813
Laju Pertumbuhan (%)	4,31	4,55	13,13	4,43	4,4

* Angka sementara

Sumber : BPS Kota Yogyakarta, 2023

Angka Kemiskinan

Berdasarkan tabel Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022 dapat diidentifikasi bahwa jumlah Penduduk miskin di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan di tahun 2019-2021 namun mengalami penurunan di tahun 2022. Jumlah Penduduk miskin Kota Yogyakarta di tahun 2021 sebanyak 34.070 jiwa dengan persentase 7,69% sementara di tahun 2022 jumlah Penduduk miskin turun menjadi 29.680 jiwa dengan persentase 6,62. Penurunan sebanyak 4.390 jiwa merupakan capaian yang baik dan perlu ditingkatkan untuk tahun



berikutnya. Jumlah Penduduk miskin Kota Yogyakarta pada tahun 2022 menyumbang 6,5% dari jumlah Penduduk miskin di Provinsi DIY.

Tabel 2.1.38 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta				
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	495.562	533.423	556.674	601.905
Jumlah Penduduk miskin (ribu jiwa)	29,45	31,62	34,07	29,68
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,84	7,27	7,69	6,62

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2019. Berdasarkan tabel Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2019-2021 nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 4,95% sementara pada tahun 2020 sebesar 9,16% namun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 9,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta. Kondisi ini terkait dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya pengurangan pegawai secara masif akibat penurunan aktivitas ekonomi.

Tabel 2.1.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022 (persentase)

Indikator	2019	2020	2021	2022
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,48	68,62	71,86	72,48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,95	9,16	9,13	7,18

Sumber : BPS Provinsi DI. Yogyakarta, 2023

Kondisi Ketimpangan Ekonomi

Kondisi ketimpangan ekonomi salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini yang menilai ketimpangan pendapatan Penduduk di suatu wilayah. Adapun pembagian kriteria ketimpangan didasarkan atas nilai Indeks Gini (rendah < 0,3; sedang 0,3-0,5; tinggi >0,5). Berdasarkan tabel Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022 menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2022. Indeks Gini Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 0,37 (ketimpangan sedang) sementara pada tahun 2022 sebesar 0,52 (ketimpangan tinggi). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Kota



Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin parah sehingga perlu untuk segera ditangani agar di tahun berikutnya tidak mengalami peningkatan ketimpangan ekonomi.

Tabel 2.1.40 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

Indikator	2019	2020	2021	2022
Indeks Gini	0,37	0,42	0,46	0,52
Kriteria Ketimpangan	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

2.1.3. Pembangunan Keluarga/Indikator Ketahanan Keluarga (IKK)/IBangga

Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dalam Perwal tersebut, telah diuraikan terkait dengan indikator ketahanan keluarga yang terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga meliputi legalitas perkawinan dan Kependudukan dan kesetaraan gender.
2. Ketahanan fisik meliputi kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, kecukupan sandang, dan tempat tinggal yang layak.
3. Ketahanan ekonomi meliputi pendapatan keluarga yang memadai, pembiayaan yang memadai untuk pendidikan dan jaminan keuangan keluarga.
4. Ketahanan sosial psikologis meliputi keutuhan dan keharmonisan keluarga dan kepatuhan keluarga terhadap hukum.
5. Ketahanan sosial budaya meliputi ketaatan beragama, kepedulian sosial dan pendidikan.

Kedepan setiap keluarga melakukan penilaian keluarga secara mandiri melalui sistem informasi pembangunan keluarga dan wawancara bagi keluarga yang tidak mampu melakukan secara mandiri. Setelah penetapan Perwal ini, maka kedepan penilaian terhadap indikator ketahanan keluarga dapat dilakukan.

Aspek Pembangunan Keluarga memuat identifikasi indikator yang dapat menjelaskan tingkat Pembangunan Keluarga yang ada di Kota Yogyakarta. Adapun indikator yang dapat merepresentasikan Pembangunan Keluarga antara lain perkawinan, tingkat perceraian, wawasan nasional, partisipasi masyarakat dalam kelompok bina keluarga sejahtera, jumlah kelompok kegiatan bina keluarga balita, jumlah kelompok kegiatan bina keluarga



remaja, jumlah kelompok kegiatan bina keluarga lansia serta jumlah usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Namun, pada tahun 2023 BKKBN mengeluarkan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang menjadi salah satu parameter dalam Pembangunan Keluarga. Indikator dalam Program Bangga Kencana meliputi laju pertumbuhan Penduduk (LPP), Total fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR), Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR), Persentase Peserta KB Aktif Jangka Panjang (MKJP), Median Usia Kawin pertama (mUKP), Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) dan indikator tambahan yaitu Ketahanan Keluarga (IKK)/IBangga. LPP, TFR dan ASFR sudah diuraikan dalam sub bab Kuantitas Penduduk.

2.1.5.1. Perkawinan

Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan pada pria maupun wanita yang telah memasuki usia 19 tahun. Perkawinan yang telah diakui dan terdata dan atau tercatat dalam dokumen negara berarti telah sah secara hukum. Perkawinan yang sah menandakan pasangan suami dan istri yang terlibat telah saling memiliki hak dan kewajiban suami istri baik terhadap satu sama lain maupun terhadap negara. Hak yang didapatkan oleh pasangan atas perkawinan yang sah meliputi buku nikah dan sebuah keberhakan untuk menuntut pada pasangannya di mata pengadilan.

Jumlah perkawinan per kemantren Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa tren perkawinan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 (Tabel 2.1.41). Jumlah perkawinan pada tahun 2018 sebanyak 2.272 sementara pada tahun 2022 sebanyak 1.879. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya tren di generasi milenial dan generasi Z tentang menurunnya minat untuk menikah yang mudah ditemukan di media sosial.

Tabel 2.1.41 Jumlah Perkawinan per Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Mantrijeron	169	153	183	180	172
Kraton	169	131	117	81	121
Mergangsan	226	218	232	207	218
Umbulharjo	299	351	325	302	254
Kotagede	159	154	176	142	122
Gondokusuman	300	313	252	199	236
Danurejan	124	113	77	89	67



Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Pakualaman	67	63	62	44	44
Gondomanan	101	96	67	74	73
Ngampilan	87	93	77	70	68
Wirobrajan	153	142	144	124	122
Gedongtengen	123	87	129	160	115
Jetis	108	109	154	204	126
Tegalrejo	187	173	164	162	141
Kota Yogyakarta	2.272	2.196	2.159	2.038	1.879

Sumber : Kemenag Kota Yogyakarta dan PA Kota Yogyakarta dalam BPS Kota Yogyakarta, 2023a

2.1.5.2. Perceraian

Data perceraian diperlukan dalam analisis terkait dengan Pembangunan Keluarga, sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa salah satunya ditunjukkan dengan menjaga hubungan rumah tangga tetap harmonis dan bertahan hingga akhir hayat.

Berdasarkan tabel 2.1.42 jumlah perceraian per kemantren Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 486. Tingginya perceraian pada tahun 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi COVID-19. Kajian yang dilakukan oleh Subky (2023) menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) menyebabkan meningkatnya angka perceraian di lima Pengadilan Agama di DIY. Penyebab tingginya angka perceraian tersebut disebabkan karena 1) alasan ekonomi karena terjadinya kehilangan pekerjaan akibat PHK ataupun karena penurunan usaha, dan 2) terjadinya penumpukan perkara perceraian pada bulan-bulan sebelumnya (Subky, 2023).

Tabel 2.1.42 Jumlah Perceraian Per Kemantren Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Mantrijeron	39	31	18	44	30
Kraton	16	20	16	16	26
Mergangsan	31	33	30	49	51
Umbulharjo	82	77	79	79	84
Kotagede	45	38	31	38	37
Gondokusuman	47	34	35	42	50
Danurejan	18	27	29	29	25
Pakualaman	9	12	14	10	11



Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Gondomanan	0	17	19	16	10
Ngampilan	14	13	19	17	20
Wirobrajan	20	23	31	29	27
Gedongtengen	23	18	20	31	24
Jetis	32	28	31	36	25
Tegalrejo	34	36	35	50	46
Kota Yogyakarta	410	407	407	486	466

Sumber : Kemenag Kota Yogyakarta dan PA Kota Yogyakarta dalam BPS Kota Yogyakarta, 2023a

2.1.5.3. Wawasan Nasional

Wawasan nasional ialah tingkat pemahaman individu terhadap hal-hal berbau wawasan nasional yang melibatkan informasi-informasi seluas mungkin. Wawasan nasional dapat dipahamkan kepada individu sedini mungkin oleh pihak keluarga sebagai pihak pembangun karakter utama dan pertama di kalangan paling dasar seorang individu. Wawasan nasional tidak dapat secara instan dimiliki oleh seseorang. Perlu yang namanya penanaman sedini mungkin terkait dengan wawasan nasional. Oleh sebab itu keluarga memegang peran yang sangat vital dalam penanaman wawasan nasional pada individu, utamanya keluarga dengan pernikahan yang sah dan berkualitas.

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.



5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan, tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera, dan kurang berketahanan sosial. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan.

Penerapan wawasan nasional dalam setiap keluarga di Kota Yogyakarta cukup susah untuk dikuantitatifkan. Beberapa indikator keluarga sejahtera sebenarnya bisa diterapkan untuk melihat sejauh mana penerapan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Namun, indikator tersebut sejak tahun 2015 sudah tidak digunakan lagi. Dengan demikian untuk mengidentifikasi penerapan fungsi keluarga dalam Pembangunan Keluarga cukup susah untuk dianalisis.

2.1.5.4. Keluarga Berencana

Peserta Keluarga Berencana (KB) adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern untuk tujuan menjarangkan atau mengatur kehamilan. Informasi terkait dengan peserta KB aktif dan persentasenya telah disajikan dalam Tabel. Sedangkan persentase untuk MKJP pada tahun 2021 sebesar 43,35% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu 40,26%. Data MKJP dan MUKP di Kota Yogyakarta masih belum lengkap sehingga ke depan menjadi pekerjaan bagi instansi terkait untuk melakukan pendataan yang dimaksud.



Tabel 2.1.43 Parameter Keluarga Berencana

Indikator	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta KB aktif	30.347	24.799	23.597	27.306
Jumlah pasangan usia subur	38.951	33.878	34.414	36.882
Cakupan peserta KB aktif (%)	77,91	73,2	68,57	74,04
% Peserta KB aktif jangka panjang (% MKJP)	n.a	40,26	47,7	47,63
% Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	n.a	n.a	50,40	52,97
<i>Unmetneed (%)</i>	n.a	n.a	24,12	28,03
MUKP (nilai)	n.a	n.a	22,9	24,7

Keterangan: n.a Tidak ada data

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2023, BKKBN, 2023

2.1.5.5. Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Sejahtera

Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Sejahtera dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan keluarga sejahtera. Kelompok Bina Keluarga Sejahtera terdiri atas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Jumlah kelompok Bina Keluarga Sejahtera Kota Yogyakarta tahun 2020-2022 secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan jumlah kelompok bina keluarga sejahtera setiap tahun semakin meningkat untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang Program Keluarga Berencana. Jumlah kelompok BKB merupakan jumlah kelompok paling banyak di Kota Yogyakarta, pada tahun 2020 sebanyak 242, tahun 2021 sebanyak 243 dan tahun 2022 sebanyak 294. Jumlah kelompok BKR merupakan jumlah kelompok paling sedikit dibanding jenis kelompok lain, pada tahun 2020 sebanyak 97, tahun 2021 sebanyak 106 dan tahun 2022 sebanyak 122. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kelompok bina keluarga sejahtera terutama perlu diutamakan untuk jumlah BKR sehingga dapat mengakomodasi pembinaan untuk keluarga yang memiliki remaja di masa mendatang.



Tabel 2.1.44 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Sejahtera Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Jenis Kelompok	2018	2019	2020	2021	2022
BKB	247	249	242	243	294
BKR	86	93	97	106	122
BKL	111	129	131	131	161
UPPKA	195	201	183	181	207
Jumlah	639	672	652	661	784

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Tabel 2.1.45 Persentase Jumlah Keluarga Kelompok Bina Keluarga Sejahtera Kota Yogyakarta tahun 2020-2021

Jenis Kelompok	2020			2021		
	Jumlah Keluarga Anggota	Berstatus PUS (%)	Berstatus PUS KB Aktif (%)	Jumlah Keluarga Anggota	Berstatus PUS (%)	Berstatus PUS KB Aktif (%)
BKB	5550	89,17	80,42	5039	89,39	78,43
BKR	2236	76,43	76,89	2178	75,30	77,32
BKL	3240	59,51	68,93	3031	58,83	65,28
UPPKA	3068	53,59	84,49	2860	65,09	65,09

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai salah satu program dari BKKBN memiliki tujuan untuk membina, membimbing dan memberikan pengetahuan tentang tumbuh kembang balita dalam rangka Pembangunan Keluarga. Adapun dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai pembinaan bagi orang tua dan keluarga yang memiliki balita. Berdasarkan tabel jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, Kemantren Umbulharjo memiliki jumlah BKB paling tinggi di Kota Yogyakarta yaitu 33 di tahun 2020, 32 di tahun 2021 dan 36 di tahun 2022. Kemantren Kraton memiliki jumlah BKB paling rendah sebanyak 11 tahun 2020 dan 2021 serta 13 pada tahun 2022.



Tabel 2.1.46 Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) per
Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Kemantren	2020	2021	2022
Tegalrejo	18	18	24
Jetis	15	16	17
Gondokusuman	16	16	17
Danurejan	12	12	14
Gedongtengen	20	20	25
Ngampilan	16	15	21
Wirobrajan	18	17	33
Mantriheron	19	19	21
Kraton	11	11	13
Gondomanan	15	16	17
Pakualaman	15	15	14
Mergangsan	21	21	22
Umbulharjo	33	32	36
Kotagede	13	15	20
Kota Yogyakarta	242	243	294

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

Bina Keluarga Remaja (BKR) juga merupakan salah satu program dari BKKBN yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, dan pengetahuan bagi orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka Pembangunan Keluarga yang lebih berkualitas. Berdasarkan tabel jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, Kemantren Gedongtengen merupakan daerah yang memiliki jumlah BKR paling tinggi yaitu 16 pada tahun 2020 dan 2021 namun menurun menjadi 15 pada tahun 2022. Kemantren Kraton menjadi daerah dengan jumlah BKR paling rendah yaitu sebanyak 4 tahun 2020 dan 2021 serta 5 pada tahun 2022.



Tabel 2.1.47 Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Kemantren	2020	2021	2022
Tegalrejo	8	8	7
Jetis	4	6	8
Gondokusuman	8	8	9
Danurejan	3	5	10
Gedongtengen	16	16	15
Ngampilan	7	7	10
Wirobrajan	9	11	11
Mantrijeron	7	7	7
Kraton	4	4	5
Gondomanan	3	4	4
Pakualaman	7	7	7
Mergangsan	6	7	9
Umbulharjo	10	10	13
Kotagede	5	6	7
Kota Yogyakarta	97	106	122

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan salah satu program dari BKKBN dalam upaya peningkatan kualitas lansia dalam Pembangunan Keluarga. Adapun upaya yang dilakukan berupa pembinaan dan pemberdayaan bagi lansia dan keluarga yang memiliki lansia melalui peningkatan ketrampilan serta pengetahuan untuk lansia. Berdasarkan tabel jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, Kemantren Gedongtengen memiliki jumlah BKL paling tinggi yaitu 17 pada tahun 2020, 16 pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 22.

Tabel 2.1.48 Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Kemantren	2020	2021	2022
Tegalrejo	6	7	9
Jetis	5	7	8



Kemantren	2020	2021	2022
Gondokusuman	8	9	10
Danurejan	5	5	10
Gedongtengen	17	16	22
Ngampilan	11	7	10
Wirobrajan	11	12	14
Mantrijeron	13	13	13
Kraton	8	8	8
Gondomanan	6	6	6
Pakualaman	8	8	9
Mergangsan	10	9	10
Umbulharjo	11	12	17
Kotagede	12	12	15
Kota Yogyakarta	131	131	161

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.1.5.6. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) adalah salah satu program dari BKKBN yang memuat pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. UPPKA utamanya berisi kegiatan usaha ekonomi produktif bagi keluarga binaan. Berdasarkan tabel jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022, Kemantren Umbulharjo merupakan daerah dengan jumlah UPPKA paling tinggi yaitu 23 pada tahun 2020, 2021 dan 2022.

Tabel 2.1.49 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) per Kemantren di Kota Yogyakarta tahun 2020-2022

Kemantren	2020	2021	2022
Tegalrejo	9	15	17
Jetis	15	12	13
Gondokusuman	17	17	18
Danurejan	9	9	11
Gedongtengen	9	9	18
Ngampilan	11	9	14
Wirobrajan	12	15	16



Kemantren	2020	2021	2022
Mantrijeron	13	11	14
Kraton	11	11	11
Gondomanan	11	11	13
Pakualaman	16	16	13
Mergangsan	16	12	13
Umbulharjo	23	23	23
Kotagede	11	11	13
Kota Yogyakarta	183	181	207

Sumber : DP3AP2KB Kota Yogyakarta

2.1.5.7. Lansia Terlantar

Keberadaan lansia terlantar memiliki hubungan dengan berbagai masalah yang berupa kemiskinan dan kesehatan. Berdasarkan tabel jumlah lansia terlantar tertangani tahun 2018-2022, mengalami kenaikan yang sangat baik. Tahun 2018 jumlah lansia terlantar tertangani sebesar 98% dan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, jumlah lansia terlantar 100% tertangani. Berikut disajikan tabel lansia terlantar tertangani.

Tabel 2.1.50 Tabel Persentase terlantar Tertangani Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Lansia terlantar tertangani (%)	98%	99,60%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

2.1.5.8. Anak Terlantar

Pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara dalam memelihara anak terlantar dengan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Keberadaan anak terlantar berkaitan dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesehatan dan rendahnya perhatian dari orang tua. Di Kota Yogyakarta, jumlah anak terlantar tertangani semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah anak terlantar tertangani mencapai 185 anak dan tahun 2020 meningkat menjadi 872 anak, jumlah ini sempat mengalami penurunan menjadi 448 pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 756 anak. Berikut disajikan data jumlah anak terlantar tertangani pada tabel berikut.



Tabel 2.1.51 Jumlah Anak Terlantar Tertangani Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah anak terlantar tertangani	185	139	872	448	756

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

2.1.5.9. Keluarga Berdasarkan Status Kesejahteraan

Keluarga berdasarkan status kesejahteraan salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan jumlah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Penentuan keluarga yang menjadi sasaran ini dapat berkaitan dengan kemiskinan yang ada di suatu wilayah sebab keluarga yang termasuk dalam kategori miskin perlu diberikan jaminan perlindungan sosial agar dapat mengatasi kemiskinan. Berdasarkan tabel dapat diidentifikasi bahwa persentase keluarga berstatus KSJPS di Kota Yogyakarta secara umum dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 fluktuatif dengan nilai tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 11,82%. Kemantren dengan persentase keluarga berstatus KSJPS tertinggi pada tahun 2022 adalah Kemantren Wirobrajan sebesar 23,12% sementara kemantren terendah adalah Kemantren Kotagede 5,28%. Nilai di Kemantren Wirobrajan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 15,16%. Hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin di kemantren tersebut sehingga perlu meningkatkan jumlah KSJPS agar dapat mengatasi kemiskinan yang ada.

Tabel 2.1.52 Jumlah dan Persentase Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022

KEMANTREN	2019		2020		2021		2022	
	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS
Tegalrejo	1391	11,26	1509	11,99	1481	11,61	1495	11,61
Jetis	1148	12,51	1273	13,5	1247	13,14	1250	13,18
Gondokusuman	1309	9,14	1554	10,6	1534	10,34	1644	11,05
Danurejan	962	13,45	1103	15,11	1084	14,67	1123	15,22
Gedongtengen	583	8,66	827	12,04	804	11,65	683	9,94
Ngampilan	447	7,46	430	7,08	422	6,95	544	8,92
Wirobrajan	1270	13,75	1465	15,55	1439	15,16	2218	23,12
Mantrijeron	1020	8,42	1318	10,74	1290	10,44	1681	13,56
Kraton	1334	17,86	1300	17,18	1280	16,83	1137	14,89
Gondomanan	570	11,27	640	12,47	627	12,16	600	11,52
Pakualaman	330	8,73	297	7,79	290	7,58	258	6,72



KEMANTREN	2019		2020		2021		2022	
	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS	JUMLAH KK KSJPS	% KK KSJPS
Mergangsan	1910	17,87	2157	19,84	2119	19,33	1864	16,89
Umbulharjo	1508	6,62	1583	6,8	1547	6,53	1774	7,41
Kotagede	577	5,21	669	5,95	646	5,68	614	5,28
Kota yogyakarta	14359	10,41	16125	11,47	15810	11,14	16886	11,82

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2023

2.1.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

2.1.5.1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Penduduk terhadap luas wilayah dalam periode waktu tertentu. Analisis terhadap kondisi kepadatan Penduduk digunakan untuk melihat distribusi atau Persebaran Penduduk dalam satu wilayah. Analisis ini juga digunakan untuk menyusun sebuah kebijakan terkait dengan distribusi ruang kebutuhan pelayanan publik di suatu wilayah. Terdapat dua data yang dianalisis dalam bagian ini yakni data yang bersumber dari data Profil Kependudukan Kota Yogyakarta 2018-2022 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta data Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2022, tingkat kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta adalah sebesar 12.585 jiwa/km². Hal ini berarti setiap kilometer persegi di wilayah Kota Yogyakarta didiami oleh sekitar 12.585 jiwa. Angka kepadatan Penduduk ini mengalami kecenderungan penurunan pada 5 tahun terakhir semenjak 2018. Penurunan ini hampir merata di keseluruhan kemantren. Kenaikan kepadatan Penduduk hanya terjadi di tiga kemantren yakni Kotagede, Gondokusuman, dan Wirobajan.

Apabila ditinjau secara keruangan kepadatan Penduduk pada tiap kemantren, maka Kemantren Ngampilan adalah Kemantren yang memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi, diikuti oleh Kemantren Gedongtengen dan Kemantren Danurejan. Tingginya kepadatan pada tiga kemantren ini tidak terlepas dari luas wilayah yang kecil dan merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta. Sehingga banyak masyarakat yang bertempat tinggal di Kemantren ini.



Pada lain sisi, kemantren dengan kepadatan Penduduk paling rendah adalah Kemantren Umbulharjo diikuti Kemantren Gondokusuman dan Kotagede. Terdapat pola menarik di mana kemantren yang memiliki kepadatan Penduduk relatif rendah memiliki kecenderungan penambahan jumlah kepadatan Penduduk pada periode 2018-2022. Wilayah yang luas menjadi salah satu penyebab Kemantren Umbulharjo dan Gondokusuman memiliki kepadatan yang paling rendah.

Apabila membandingkan dengan data yang disajikan dalam publikasi Kota Yogyakarta Dalam Angka terdapat selisih terkait jumlah kepadatan Penduduk. Terdapat kurang lebih perbedaan antara 1000-2000 jiwa/km².

Pada tahun 2022, tingkat kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta adalah sebesar 11.659 jiwa/km². Hal ini berarti setiap kilometer persegi di wilayah Kota Yogyakarta didiami oleh sekitar 11.659 jiwa. Angka kepadatan Penduduk ini mengalami kecenderungan penurunan pada 5 tahun terakhir semenjak 2018. Penurunan ini hampir merata di keseluruhan kemantren. Kenaikan kepadatan Penduduk hanya terjadi di dua kemantren yakni Kraton dan Mantrijeron.

Tabel 2.1.53 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 (jiwa/km²) Berdasarkan Kota Yogyakarta Dalam Angka

Kemantren	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tegalrejo	13.296	12.771	11.897	11.968	12.034
Jetis	14.139	15.960	13.756	13.838	13.915
Gondokusuman	11.963	10.731	9.253	9.309	9.360
Danurejan	17.475	19.395	16.973	17.104	17.227
Gedongtengen	19.319	20.720	17.171	17.723	17.369
Ngampilan	20.874	22.622	18.729	18.841	18.945
Wirobrajan	14.849	15.834	14.056	14.140	14.218
Mantrijeron	12.907	13.576	12.774	12.930	13.083
Kraton	12.554	15.594	12.816	12.926	13.031
Gondomanan	12.304	13.377	11.422	11.490	11.554
Pakualaman	14.819	17.159	14.521	14.608	14.689
Mergangsan	13.349	13.871	12.441	12.516	12.585
Umbulharjo	11.437	8.607	8.395	8.445	8.492
Kotagede	12.357	11.176	10.840	10.975	11.107
Kota Yogyakarta	13.296	12.740	11.495	11.579	11.659

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2019-2023



Apabila ditinjau secara keruangan kepadatan Penduduk pada tiap kemantren, maka Kemantren Ngampilan adalah Kemantren yang memiliki tingkat kepadatan yang paling tinggi, diikuti oleh Kemantren Gedongtengen dan Kemantren Danurejan. Tingginya kepadatan pada tiga kemantren ini tidak terlepas dari luas wilayah yang kecil dan merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Yogyakarta. Sehingga banyak masyarakat yang bertempat tinggal di Kemantren ini.

Pada lain sisi, kemantren dengan kepadatan Penduduk paling rendah adalah Kemantren Umbulharjo diikuti kemantren Gondokusuman dan Kotagede. Terdapat pola menarik di mana kemantren yang memiliki kepadatan Penduduk relatif rendah memiliki kecenderungan penambahan jumlah kepadatan Penduduk pada periode 2018-2022. Wilayah yang luas menjadi salah satu penyebab Kemantren Umbulharjo dan Gondokusuman memiliki kepadatan yang paling rendah.

2.1.5.2. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan Penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi suatu wilayah dan bertujuan untuk menetap pada wilayah yang dituju. Terdapat dua jenis migrasi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk. Migrasi masuk menunjukkan Penduduk yang masuk ke suatu wilayah, sedangkan migrasi keluar menunjukkan Penduduk yang keluar dari suatu wilayah.



Tabel 2.1.54 Jumlah Migrasi Keluar dan Migrasi Masuk di Yogyakarta yang Tercatat Tahun 2018-2022

Kemantren	2018		2019		2020		2021		2022	
	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk
Tegalrejo	791	847	770	825	678	600	846	672	932	901
Jetis	602	592	494	605	488	429	504	471	656	619
Gondokusuman	1036	1198	947	1271	858	837	1041	991	1416	1264
Danurejan	396	530	393	541	390	327	443	361	641	477
Gedongtengen	385	327	354	365	350	216	447	254	519	385
Ngampilan	376	351	384	370	315	267	414	267	532	386
Wirobrajan	522	573	533	614	474	403	631	459	702	723
Mantrijeron	687	845	579	655	578	504	718	692	917	758
Kraton	365	386	369	348	341	293	356	310	558	450
Gondomanan	306	297	265	222	249	222	299	240	377	306
Pakualaman	205	227	224	228	196	111	229	157	266	233
Mergangsan	643	686	666	620	584	480	626	527	828	648
Umbulharjo	1400	1812	1249	1584	1158	1175	1445	1402	1890	1790
Kotagede	650	779	556	790	551	593	627	672	734	894
Total	8364	9450	7783	9038	7210	6457	8626	7475	10968	9834

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022;



Kemantren Umbulharjo selama periode 2018-2022 merupakan kemantren dengan angka migrasi masuk dan keluar yang paling besar di Kota Yogyakarta. Sedangkan, Kemantren Pakualaman merupakan kemantren dengan angka migrasi masuk dan keluar paling kecil di Kota Yogyakarta. Kecuali untuk angka migrasi masuk tahun 2019 paling kecil terletak di Kemantren Gondomanan.

Dalam studi migrasi terdapat istilah migrasi netto yang berarti selisi antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif dan sebaliknya apabila migrasi keluar lebih besar maka disebut migrasi netto negatif.

Tabel 2.1.55 Migrasi Netto

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Tegalrejo	56	55	-78	-174	-31
Jetis	-10	111	-59	-33	-37
Gondokusuman	162	324	-21	-50	-152
Danurejan	134	148	-63	-82	-164
Gedongtengen	-58	11	-134	-193	-134
Ngampilan	-25	-14	-48	-147	-146
Wirobrajan	51	81	-71	-172	21
Mantrijeron	158	76	-74	-26	-159
Kraton	21	-21	-48	-46	-108
Gondomanan	-9	-43	-27	-59	-71
Pakualaman	22	4	-85	-72	-33
Mergangsan	43	-46	-104	-99	-180
Umbulharjo	412	335	17	-43	-100
Kotagede	129	234	42	45	160
Total	1.086	1.255	-753	-1.151	-1.134

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Pada tahun 2022, angka migrasi keluar di Kota Yogyakarta lebih besar dari angka migrasi masuk, sehingga migrasi netto nya bernilai negatif yaitu -1134. Apabila dilihat secara keseluruhan di setiap kemantren maka hampir semua kemantren menunjukkan migrasi netto negatif kecuali Kemantren Kotagede dan Wirobrajan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah Penduduk yang meninggalkan Kota Yogyakarta dan menetap di kota/kabupaten lainnya lebih banyak dari pada yang masuk dan menetap di wilayah Kota Yogyakarta. Kondisi ini berbeda apabila melihat data pada tahun-tahun sebelumnya.



Dalam dokumen GDPK Kota Yogyakarta yang telah disusun sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah migrasi masuk lebih banyak dari jumlah migrasi yang keluar. Terdapat perubahan pola migrasi di Kota Yogyakarta dan menjadi menarik untuk dilihat lebih mendalam bagaimana terdapat tren migrasi keluar di Kota Yogyakarta.

2.1.5.3. Infrastruktur Penunjang Mobilitas

Tabel 2.1.56 Capaian Pembangunan Infrastruktur air minum dan jalan

Parameter	2018	2019	2020	2021
Persentase air minum terakses	80,13	99,27	99,75	-
Persentase jalan dalam kondisi mantap	81,94	86,12	79,96	98,77
Persentase Drainase dengan Kondisi Baik	87,41	87,58	87,6	87,6

Sumber: (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022)

Guna mendukung program untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maka perlu dilihat beberapa infrastruktur yang berfungsi sebagai penunjang Mobilitas Penduduk. Data yang relevan yakni mengenai air minum, jalan, dan drainase. Berdasarkan data mengenai infrastruktur di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar menunjukkan peningkatan dan sudah mendekati angka 100%.

Data mengenai akses akan air minum menunjukkan angka yang cukup baik. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari awal tahun 2018 hingga tahun 2020 dimana terdapat kenaikan hingga hampir 20%. Hal ini menandakan bahwa akses masyarakat akan air minum di Kota Yogyakarta sudah baik. Namun, perlu juga diamati terkait dengan bagaimana keberlanjutan dan jenis/bentuk penerimaan air minum. Akses melalui pipa dapat didorong untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap air minum dalam kemasan (AMDK).

Terkait kondisi jalan juga menunjukkan angka yang baik. Hal ini dapat dilihat dari angka persentase jalan dengan kondisi mantab mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan hampir mencakup keseluruhan panjang jalan. Hal ini menandakan bahwa kondisi jalan yang mantab sudah dirasakan di hampir total jalan seluruh kota.



Drainase merupakan infrastruktur yang penting untuk melancarkan jalannya air supaya tidak menimbulkan genangan dan juga sebagai saluran pembuangan. Capaian pembangunan drainase sendiri menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan selama periode 2018-2021. Hal ini menandakan belum optimalnya pembangunan dan perawatan dari drainase. Penting untuk dilakukan perbaikan agar masalah yang ditimbulkan dari kerusakan maupun hambatan drainase dapat diminimalisir.

2.1.5.4. Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup menjadi aspek penting untuk menunjang ruang hidup dari Penduduk yang tinggal di suatu ruang. Dalam aspek mobilitas Penduduk tentu perlu melihat bagaimana ruang hidup dapat mengakomodir dan tidak memberikan dampak yang negatif bagi kualitas lingkungan hidup. Rezim kualitas lingkungan hidup dihitung dalam indeks komposit berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)-khusus daerah yang memiliki lahan gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) bagi daerah yang memiliki wilayah laut. IKLH digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan merupakan indikator kinerja utama dari program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Lebih lanjut, IKLH dapat dipergunakan untuk mengevaluasi gambaran umum kualitas lingkungan hidup dan bagaimana pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Tabel 2.1.57. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Parameter	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,36 (Kurang Baik)	53,67 (Kurang Baik)	55,64 (Kurang Baik)	60,84 (Cukup Baik)

Sumber: Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2022

Capaian kualitas lingkungan hidup di Kota Yogyakarta secara umum masih pada kriteria kurang baik. Baru pada tahun 2021 IKLH masuk dalam kriteria cukup baik. Apabila dilihat tren IKLH semakin membaik. Walaupun demikian, capaian IKLH Kota Yogyakarta masih ada di bawah rata rata nasional. Oleh karena itu, dalam konteks Pembangunan Kependudukan ke depannya perlu didorong untuk mengurangi dampak pertambahan jumlah dan Mobilitas Penduduk agar tetap ramah lingkungan.



2.1.5. Administrasi Kependudukan

2.1.5.1. Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan

Penataan dan Pengelolaan database Kependudukan tertuang dalam salah satu tujuan Administrasi Kependudukan¹. Dalam tujuan tersebut disebutkan bahwa tertib database Kependudukan meliputi terbangunnya database Kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota; database Kependudukan Kabupaten/Kota tersambung (*online*) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan daerah tersambung (*online*) dengan instansi pengguna. Kondisi di Kota Yogyakarta sendiri, pengelolaan *database* Kependudukan sudah dapat dikatakan baik.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pemutakhiran *database* Kependudukan; meningkatkan kualitas database Kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan SIAK secara *online*. Selain itu strategi lain yang diterapkan antara lain dengan percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) maupun Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum bagi pelanggaran Administrasi Kependudukan. Contoh dokumen tentang penyelenggaraan Adminduk di Kota Yogyakarta antara lain Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018.

2.1.5.2. Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Dalam rangka menggambarkan kondisi penataan Administrasi Kependudukan di lingkungan Kota Yogyakarta, beberapa indikator dipilih. Pemilihan indikator didasarkan pada kelengkapan data adminduk yang tersedia di Kota Yogyakarta dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan yang menggambarkan penataan administrasi yang tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hal tersebut beberapa indikator yang terpilih antara lain kepemilikan Penduduk atas dokumen KTP-el, kepemilikan Penduduk atas dokumen kartu keluarga, kepemilikan Penduduk atas dokumen akta kelahiran, dan kepemilikan Penduduk atas dokumen akta kematian. Selain itu untuk menggambarkan kondisi tertib Administrasi Kependudukan, akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kota Yogyakarta.

¹ <http://dukcapil.kemendagri.go.id/detail/tertib-administrasi-kependudukan>



Tabel 2.1.58 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki KTP Elektronik Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Tegalrejo	97,93	98,99	98,04	97,66	97,5
Jetis	97,12	98,68	97,19	96,86	97,72
Gondokusuman	97,61	99,12	97,87	97,31	98,03
Danurejan	97,83	99,02	97,94	97,27	97,8
Gedongtengen	96,77	99,05	96,96	96,55	97,8
Ngampilan	97,91	99,19	98,08	97,68	98,24
Wirobrajan	98,10	99,1	97,92	97,52	97,64
Mantrijeron	97,85	99,12	97,96	97,6	98,19
Kraton	97,78	99,13	97,97	97,55	98,02
Gondomanan	98,17	99,09	98,43	97,92	98,25
Pakualaman	98,00	99,03	98,25	97,43	97,99
Mergangsan	98,16	99,13	98,53	97,84	98,08
Umbulharjo	97,99	99,12	98,18	97,64	97,56
Kotagede	98,42	99,03	98,63	98,06	97,21
Kota Yogyakarta	97,86	99,06	98,02	97,52	97,8

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Capaian kepemilikan KTP-El sendiri di Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan hal yang baik. Hal tersebut dilihat dari tren yang ditunjukkan dari persentase kepemilikan KTP-El yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Yogyakarta, persentase kepemilikan KTP-El mencapai sebesar 97,8 persen pada tahun 2022. Artinya pada tahun 2022 ini, dari 100 Penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki KTP-El sebanyak 98 orang sudah memiliki KTP-El. Hal ini merupakan capaian yang baik.

Tabel 2.1.59 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%
Tegalrejo	73,01	74,51	75,02	75,87	77,03
Jetis	67,15	71,38	71,63	72,51	74,70
Gondokusuman	70,09	71,88	72,46	74,29	75,97
Danurejan	66,29	67,91	68,65	69,68	71,69



Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Gedongtengen	64,71	66,9	67,34	68,26	70,46
Ngampilan	69,09	70,36	70,99	71,94	73,38
Wirobrajan	74,35	75,71	76,14	77,15	78,85
Mantrijeron	72,69	73,91	74,21	75,09	76,41
Kraton	70,41	71,85	72,25	73,47	74,80
Gondomanan	68,24	69,59	70,47	71,87	73,99
Pakualaman	68,18	69,52	70,05	70,93	72,51
Mergangsan	68,74	69,92	70,78	71,84	73,35
Umbulharjo	73,79	75,21	75,73	76,31	77,50
Kotagede	74,32	75,31	75,82	76,46	77,57
Kota Yogyakarta	70,93	72,55	73,09	74,07	75,60

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Salah satu target terukur dalam pembangunan SDGs pada tujuan ke 16 adalah pada 2030 menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk registrasi kelahiran. Sebagai salah satu negara yang mengadopsi SDGs maka tujuan tersebut juga harus dicapai oleh Indonesia. Artinya pada tahun 2030, seluruh Penduduk Indonesia ditargetkan harus tercatat identitasnya secara legal, terkhusus adalah teregistrasi kelahirannya.

Capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sendiri dapat dikatakan memuaskan jika dilihat perkembangannya. Sejak tahun 2018-2022 peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran sangat signifikan. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat peningkatan capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta meningkat 4,67 persen. Pada tahun 2022, capaian kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sebesar 75,60 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah Penduduk yang memiliki akta kelahiran dibandingkan seluruh Penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1.60 Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Tegalrejo	100	100	100	100	100
Jetis	100	100	100	100	100



Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Gondokusuman	100	100	100	100	100
Danurejan	100	100	100	100	100
Gedongtengen	100	100	100	100	100
Ngampilan	100	100	100	100	100
Wirobrajan	100	100	100	100	100
Mantrijeron	100	100	100	100	100
Kraton	100	100	100	100	100
Gondomanan	100	100	100	100	100
Pakualaman	100	100	100	100	100
Mergangsan	100	100	100	100	100
Umbulharjo	100	100	100	100	100
Kotagede	100	100	100	100	100
Kota Yogyakarta	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Indikator yang dapat diukur dari pencapaian kepemilikan dokumen kartu keluarga adalah persentase kepemilikan kartu keluarga. Indikator ini merupakan hasil bagi antara keluarga yang memiliki dokumen kartu keluarga dengan jumlah seluruh keluarga Kota Yogyakarta yang lapor ke Dukcapil. Berdasarkan capaian kepemilikan kartu keluarga, selama 2018-2022 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Persentase kepala keluarga yang memiliki kartu keluarga di Kota Yogyakarta sebesar 100 persen. Artinya bahwa dari seluruh keluarga yang melaporkan dan terdata ke Dukcapil Kota Yogyakarta, seluruhnya sudah tertib dokumen kartu keluarga. Bahkan kondisi ini telah terjadi sejak 2014 sampai dengan saat ini.

Tabel 2.1.61 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Memiliki Akta Kematian Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Tegalrejo	1.181	1.501	1.759	2.222	-
Jetis	918	1.184	1.432	1.838	-
Gondokusuman	1.408	1.762	2.122	2.670	-
Danurejan	779	975	1.171	1.457	-
Gedongtengen	776	959	1.156	1.434	-
Ngampilan	764	934	1.099	1.380	-



Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
Wirobrajan	952	1.210	1.431	1.827	-
Mantrijeron	1.188	1.495	1.771	2.310	-
Kraton	828	1.053	1.249	1.582	-
Gondomanan	573	707	848	1.091	-
Pakualaman	430	529	625	779	-
Mergangsan	1.146	1.397	1.678	2.108	-
Umbulharjo	2.115	2.668	3.148	3.937	-
Kotagede	926	1.193	1.431	1.846	-
Kota Yogyakarta	13.984	17.567	20.920	26.481	50.449

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Kepemilikan dokumen akta kematian juga menjadi salah satu indikator dalam melihat deskripsi kondisi terini aspek data dan informasi Kependudukan. Akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Penduduk yang meninggal harus dilaporkan untuk dihapus. Capaian kepemilikan akta kematian di tingkat kemantren juga mengalami peningkatan. Capaian kepemilikan akta kematian di seluruh kemantren di Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan sejak 2018 sampai 2022. Beberapa kemantren yang mengalami peningkatan kepemilikan akta kematian secara signifikan antara lain Kemantren Umbulharjo, Mantrijeron, dan Gondokusuman.

Tabel 2.1.62 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta Dengan Status Kawin yang Memiliki Akta Perkawinan Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%
Tegalrejo	58,19	72,32	77,95	81,99	84,35
Jetis	53,93	68,07	74,29	78,38	85,28
Gondokusuman	45,47	62,95	69,61	76,39	83,29
Danurejan	48,65	62,78	71,09	76,61	84,15
Gedongtengen	49,52	62,33	67,33	72,62	79,85
Ngampilan	46,5	60,28	72,22	76,69	84,50
Wirobrajan	55,85	68,74	75,62	80,76	89,70
Mantrijeron	57,36	68,03	74,73	78,74	89,75
Kraton	62,54	71,31	77,14	80,21	83,41
Gondomanan	59	69,88	75,78	82,45	86,33



Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Pakualaman	50,82	64,11	73,54	76,89	82,87
Mergangsan	53,72	64,33	70,99	77,64	83,87
Umbulharjo	66,46	76,18	80,40	82,96	89,91
Kotagede	51,16	64,48	72,26	78,47	86,80
Kota Yogyakarta	55,54	67,94	74,50	79,22	86,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Kepemilikan akta perkawinan dilihat sebagai persentase kepemilikan antara Penduduk dengan status kawin dan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan. Secara umum terdapat peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2018-2022. Kemantren dengan persentase tertinggi terletak di Kemantren Umbulharjo. Sedangkan, kemantren dengan persentase terendah pada 3 tahun terakhir terletak di Kemantren Gedongtengen. Kondisi ini memiliki tren yang baik di mana terdapat kenaikan persentase kepemilikan dokumen administrasi perkawinan.

Tabel 2.1.63 Persentase Penduduk Kota Yogyakarta Dengan Status Cerai yang Memiliki Akta Perceraian Menurut Kemantren Tahun 2018-2022

Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Tegalrejo	90,98	91,59	92,23	92,69	93,20
Jetis	80,34	78,99	81,20	84,42	86,77
Gondokusuman	84,13	86,05	88,41	89,15	90,49
Danurejan	90,96	91,13	91,61	93,17	93,22
Gedongtengen	80,63	84,29	85,60	86,76	88,24
Ngampilan	81,61	83,55	86,29	87,35	89,31
Wirobrajan	83,69	86,28	87,48	89,04	90,21
Mantrijeron	91,47	92,07	92,71	93,31	93,43
Kraton	88,47	89,66	91,04	91,18	92,15
Gondomanan	91,76	92,31	92,76	93,52	94,27
Pakualaman	87,02	85,12	86,28	88,14	90,91
Mergangsan	88,06	88,08	89,38	90,62	91,53
Umbulharjo	94,64	94,94	94,99	94,97	95,24
Kotagede	80	81,83	82,91	84,03	85,89



Kemantren	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Kota Yogyakarta	87,38	88,27	89,42	90,41	91,43

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2018-2022

Kepemilikan akta perceraian dilihat sebagai persentase kepemilikan antara Penduduk dengan status cerai dan jumlah akta perceraian yang diterbitkan. Secara umum terdapat peningkatan persentase kepemilikan akta perkawinan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2018-2022. Kemantren dengan persentase tertinggi terletak di Kemantren Umbulharjo. Sedangkan, kemantren dengan persentase terendah pada tahun 2018 dan 2021-2022 terletak di Kemantren Kotagede. Pada tahun 2019-2020 persentase terendah terletak di Kemantren Jetis. Kondisi ini memiliki tren yang baik di mana terdapat kenaikan persentase kepemilikan dokumen administrasi perkawinan. Perlu upaya untuk menjaga tren yang baik ini. Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Yogyakarta, telah dilakukan dengan beragam inovasi sebagai berikut (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2019):

1. Layanan online adminduk. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan online untuk mengurus akta kelahiran, akta kematian dan pindah Penduduk melalui website <https://Kependudukan.jogjakota.go.id> pada menu layanan PELAYANAN ON LINE SIPAK.
2. Layanan 3 in 1 di rumah sakit dan dinas. Masyarakat yang melahirkan di rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dapat menerima layanan 3 in 1 yaitu mendapatkan layanan pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan KIA setelah pulang dari rumah sakit.
3. Layanan jemput bola mobil keliling. Pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan jemput bola kepemilikan KTP Elektronik bagi diffabel dan lansia. Demikian halnya jemput bola untuk KTP elektronik dan KIA di kelurahan dan di sekolah-sekolah. Percepatan pembuatan KIA dilakukan secara jemput bola dengan menggunakan mobil pelayanan keliling ke tempat publik sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan. Percepatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dilakukan melalui jemput bola dengan targetnya adalah seluruh masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Pelayanan jemput bola dilaksanakan di kelurahan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dindikcapil.



4. Layanan informasi data Kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi *Jogja Smart Service (JSS)* pada menu *Datawarehouse*. Layanan JSS juga dapat digunakan untuk melakukan kepengurusan akta kelahiran, Kartu keluarga dan KIA.
5. Layanan sms masking dan perubahan status perkawinan online. Layanan pesan sms ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait dengan status kepemilikan Dokumen Kependudukan atau informasi Kependudukan lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bekerjasama dengan KUA untuk memberikan pelayanan online terkait dengan perubahan status perkawinan Penduduk dalam database Kependudukan. Ketika terjadi perkawinan di KUA, secara otomatis status perkawinan akan berubah.
6. Layanan Mantul atau disebut dengan 'Manten Anyar Entuk Telu' adalah layanan Kependudukan untuk warga non muslim dimana pada saat berlangsung proses pernikahan dalam pengurusan dokumen akan mendapatkan Dokumen Kependudukan yaitu kutipan Akta perkawinan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penerbitan Kartu Keluarga Baru.

Inovasi pelayanan Kependudukan ini dilaksanakan pada seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib adminduk. Pelayanan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan.



BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

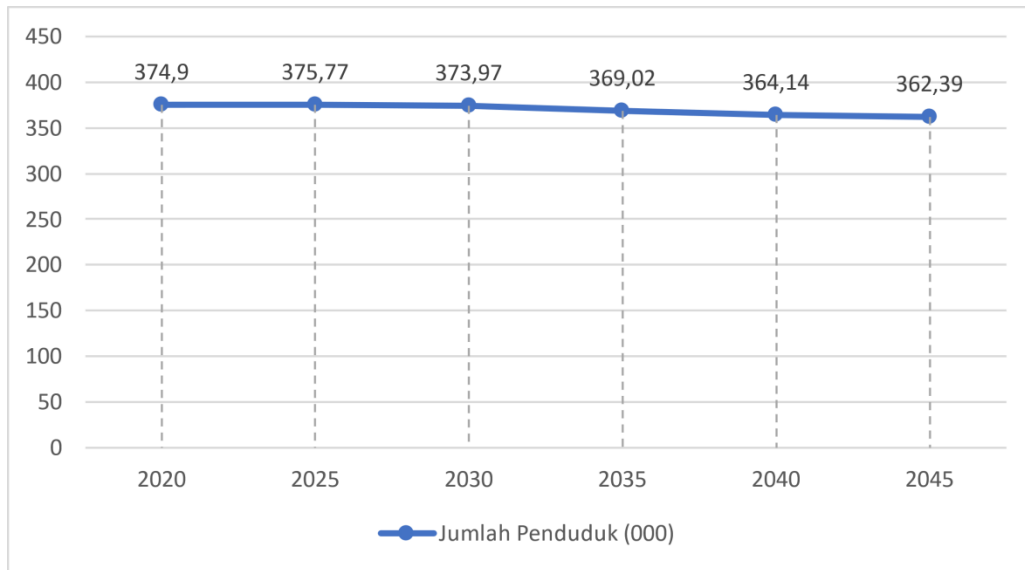
Bab III berisi proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan 2045, analisis potensi dan dampak yang ditimbulkan serta kondisi ideal yang diharapkan. Perhitungan proyeksi Penduduk menggunakan data utama dari hasil proyeksi Penduduk Tahun 2020-2035 terbitan BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023). Sedangkan untuk proyeksi Penduduk pada 2040-2045 dilakukan proyeksi hasil olah data dengan memanfaatkan data Penduduk tahun sebelumnya menggunakan rumus pertumbuhan geometri. Analisis potensi dan dampak yang ditimbulkan diperoleh dari analisis proyeksi indikator 5 pilar GDPK sampai 2045. Sedangkan kondisi ideal yang diharapkan diperoleh melalui dua langkah utama. Pertama dengan memaparkan kondisi yang diproyeksikan ke depan dengan mempertimbangkan pola dari nilai di masa lalu. Kedua, hasil proyeksi kemudian dibahas secara bersama dengan OPD terkait untuk mendapatkan kondisi ideal yang diinginkan sampai tahun 2045. Secara rinci berikut adalah pembahasan mengenai proyeksi Penduduk sampai 2045, analisis potensi dan dampak yang ditimbulkan serta kondisi ideal yang diharapkan di Kota Yogyakarta.

3.1. Proyeksi Penduduk dan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Perhitungan proyeksi Penduduk dalam bab ini menggunakan data eksisting yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023) dengan tahun proyeksi yang tersedia adalah 2020-2035. Sedangkan untuk proyeksi Penduduk pada 2040-2045 dihitung menggunakan pola pertumbuhan di masa lalu dengan memanfaatkan perhitungan pertumbuhan Penduduk geometris. Berdasarkan dua metode perhitungan tersebut maka di peroleh hasil proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta 2020-2045.

Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2020-2045 mengikuti pola tertentu. Pola tersebut adalah pada 2020-2025 jumlah Penduduknya mengalami kenaikan jumlah. Pada 2020 jumlahnya sebesar 374,9 ribu jiwa menjadi 375,77 ribu jiwa. Kemudian setelah 2025 jumlahnya mengalami penurunan terus sampai tahun 2045. Pada 2045 jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta diproyeksikan sebesar 362,39 ribu jiwa. Hasil proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta pada 2020-2045 dapat dilihat pada Gambar 3.1.1.





Gambar 3.1. 1. Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2045

Sumber: BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023) untuk proyeksi sampai 2035; data diolah (2023) untuk proyeksi 2040-2045

Proyeksi Penduduk yang dibuat tersebut diperoleh dengan mengendalikan beberapa indikator Kependudukan utamanya adalah indikator yang berhubungan dengan fertilitas dan mortalitas. Indikator tersebut harus berada pada beberapa kondisi yang diinginkan agar sejalan dengan hasil proyeksi yang dibuat. Secara umum kondisi yang diinginkan untuk aspek kuantitas adalah mengendalikan jumlah Penduduk Kota Yogyakarta dan berusaha untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) di masa mendatang. Hal ini dikarenakan kondisi PTS merupakan kondisi ideal dari aspek Kuantitas Penduduk (lihat Tukiran, 2010; Swanson & Siegel, 2004), sehingga Kota Yogyakarta perlu untuk mewujudkannya.

Kondisi ideal pada aspek fertilitas di Kota Yogyakarta dilihat dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 tahun. Nilai TFR di Kota Yogyakarta menjadi penyumbang rendahnya TFR di DIY. Nilai TFR Kota Yogyakarta merupakan nilai terendah dibandingkan nilai TFR di kabupaten/kota lainnya di DIY (lihat BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Oleh karena itu untuk kondisi ideal di Kota Yogyakarta, nilai TFR pada periode 2020-2045 berkisar 1,6-1,7. Melihat pola dari fertilitas Penduduk di Kota Yogyakarta maka kondisi Penduduk tumbuh seimbang, dengan indikator TFR 2,1, akan sulit diwujudkan pada periode 2020-2045. Meskipun demikian melihat kenaikan pada periode 2040-2045, harapan untuk mewujudkan PTS sangat terbuka.



Indikator fertilitas berikutnya adalah angka kelahiran (ASFR) pada kelompok umur 15-19 tahun. Nilai ASFR pada kelompok umur 15-19 tahun mengalami penurunan. Pada 2045 nilai ASFR 15-19 tahun diproyeksikan nilainya sebesar 1,12 persen. Capaian ASFR 15-19 tahun yang rendah dipengaruhi oleh beberapa aspek:

a. Usia perkawinan pertama

Usia perkawinan pertama pada perempuan berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Dalam hal ini mempengaruhi nilai TFR atau kesuburan umum dan ASFR atau angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun. Rendahnya rata-rata umur perkawinan pertama berkorelasi terhadap tingginya tingkat fertilitas (Zulmi & Nugraha, 2022). Tingkat pendidikan perempuan dan kondisi sosial ekonomi mempengaruhi usia perkawinan pertama perempuan. Usia ideal perkawinan yang ditentukan oleh BKKBN bagi perempuan yaitu 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun.

b. Pendidikan perempuan

Salah satu faktor meningkatnya usia kawin pertam perempuan adalah terkait dengan pendidikan. Pendidikan perempuan yang dimaksud tidak hanya dari sisi jenjang pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan pengetahuan perempuan tentang sesuatu hal seperti tentang KB. Pemahaman yang dimiliki oleh perempuan dapat memberikan pertimbangan untuk memutuskan ber-KB atau tidak. Jenjang pendidikan seorang perempuan mempengaruhi usia kawin pertamanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jumlah anak yang dilahirkan lebih sedikit (Hanum & Andiny, 2018).

Melihat tersebut maka langkah tersebut perlu dilakukan agar kondisi yang diinginkan di Kota Yogyakarta dapat terwujud.

Kondisi ideal pada aspek mortalitas di Kota Yogyakarta diwakili oleh indikator *Infant Mortality Rate* (IMR). Pada 2020 nilai IMR di Kota Yogyakarta sebesar 10,28. Kemudian diharapkan nilainya terus turun sampai 2035 menjadi 7 (BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023). Diharapkan sampai 2045 nilai IMR sebesar 7 dipertahankan. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi mortalitas adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Kondisi pada 2020, nilai AHH di Kota Yogyakarta adalah sebesar 74,76 tahun. Pada 2045 kondisi ideal yang diharapkan adalah nilai AHH sebesar 77,69 tahun.

Berdasarkan proyeksi Penduduk dan kondisi ideal yang diinginkan, pada aspek Kuantitas Penduduk, beberapa potensi dan dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasi. Dari aspek potensi berikut adalah rinciannya:

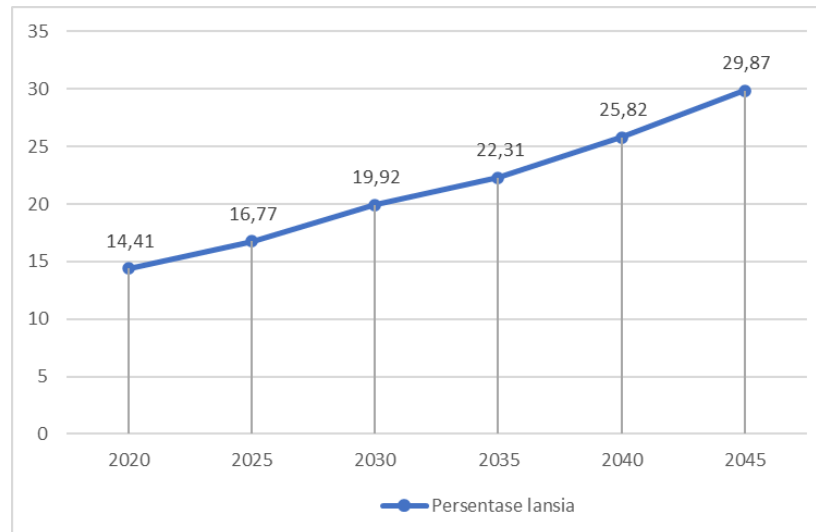


1. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta, sampai tahun 2045, diproyeksikan didominasi oleh Penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) akan semakin menurun. Jika pada tahun 2020, prosentase jumlah Penduduk usia produktif masih sekitar 60%, maka pada tahun 2045 akan menurun menjadi sekitar 43 %. Besarnya persentase usia produktif berasosiasi positif terhadap melimpahnya angkatan kerja produktif dan potensi meningkatnya tingkat perekonomian (Bloom, Canning & Sevilla, 2001; Nasution, 2021). Bahkan usia produktif yang tinggi memiliki hubungan positif dengan naiknya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan naiknya pendapatan per kapita (Nasution, 2021; Fahmy, Harlen & Ekwarso, 2022). Oleh karenanya, disituasi yang ada saat ini harus dimanfaatkan agar usia produktif di Kota Yogyakarta ini benar-benar “produktif” dan aktif dalam proses pembangunan.
2. Angka harapan hidup di Kota Yogyakarta diprediksi terus meningkat sampai tahun 2045. Artinya bahwa derajat kesehatan sangat tinggi di Kota Yogyakarta. Semakin tinggi angka harapan hidup menandakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh Penduduk semakin meningkat. Oleh karenanya manfaat ekonomi yang akan dihasilkan juga semakin tinggi mengingat Penduduk di wilayah tersebut memiliki usia yang panjang dan sehat. Meskipun di satu sisi, dengan meningkatnya angka harapan hidup Penduduk Kota Yogyakarta dan menurunnya TFR akan berdampak kepada peningkatan angka ketergantungan Penduduk Kota Yogyakarta.

Pada aspek dampak yang ditimbulkan, beberapa potensi dampak Kependudukan yang dimungkinkan muncul dari aspek kuantitas antara lain:

1. Peningkatan jumlah dan persentase lansia akan membawa dampak pada aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Persentase lansia di Kota Yogyakarta diproyeksikan meningkat hingga tahun 2045. Usia lansia yang dimaksud yaitu Penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahun 2020, persentase lansia sebesar 14,41% yang kemudian meningkat setiap tahun dan mencapai angka 29,87% pada tahun 2045. (Gambar 3.1.2)





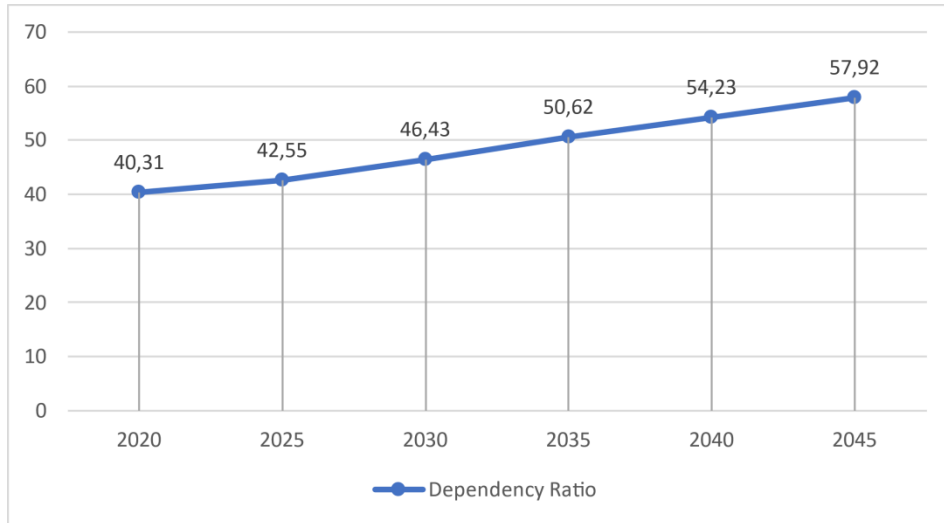
Gambar 3.1. 2. Proyeksi Persentase Lansia di Kota Yogyakarta

Pada aspek ketenagakerjaan, pekerjaan yang bisa diisi oleh pekerja lansia harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan secara umum lansia di Indonesia bukanlah lansia yang benar-benar pasif di sektor ketenagakerjaan. Lansia di Indonesia adalah Penduduk berusia 60 tahun ke atas yang sudah dianggap tidak produktif dari sisi ilmu demografi, tetapi masih aktif dalam bekerja. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan semaksimal mungkin untuk tidak bergantung kepada orang lain. Sehingga dengan meningkatnya lansia di Kota Yogyakarta maka harus dipikirkan sektor ketenagakerjaan yang potensial untuk dimasuki para lansia ini di masa depan. Pada aspek kesehatan, lansia identik dengan perawatan/layanan kesehatan. Menurut data Riskesdas 2018, penyakit tidak menular di DIY didominasi diderita oleh lansia. Maka dengan semakin naiknya lansia di Kota Yogyakarta maka kesiapan layanan kesehatan bagi lansia juga harus diperhatikan. Pada aspek ekonomi, lansia diasosiasikan dengan Penduduk non produktif. Sehingga dengan naiknya lansia di Kota Yogyakarta akan menyebabkan “beban” ketergantungan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya Penduduk lansia, menjadi tantangan bagi pemerintah agar menyediakan sarana dan prasarana yang pro lansia serta memberikan kesempatan bagi para lansia untuk melakukan aktivitas produktif di hari tuanya.

2. Meningkatnya beban ketergantungan di Kota Yogyakarta. Pada 2020 beban ketergantungan di Kota Yogyakarta sebesar 40,31 dan terus naik sampai 57,92 pada 2045. Tren peningkatan angka ketergantungan di Kota Yogyakarta lebih banyak disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan persentase Penduduk berusia lanjut. Hal menunjukkan bahwa



semakin banyak jumlah Penduduk yang tidak produktif yang harus ditanggung oleh Penduduk usia produktif. Berikut grafik 3.1.3 yang menggambarkan angka ketergantungan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2045.



Gambar 3.1. 3. Angka Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2045

Rincian data proyeksi Penduduk menurut kelompok usia serta proyeksi angka ketergantungan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	19,45	18,34	17,71	17,49	16,88	16,3
15-64	71,27	70,15	68,29	66,39	64,84	63,32
65+	9,28	11,51	14	16,12	18,28	20,38
DR	40,31	42,55	46,43	50,62	54,23	57,92

Prediksi naiknya beban ketergantungan ini memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi pertama adalah dengan berhasilnya pemanfaatan bonus demografi di tahun awal periode 2020-2045 maka beban ketergantungan ini tidak akan menimbulkan masalah jika Penduduk usia lanjut yang ada adalah sehat dan produktif.

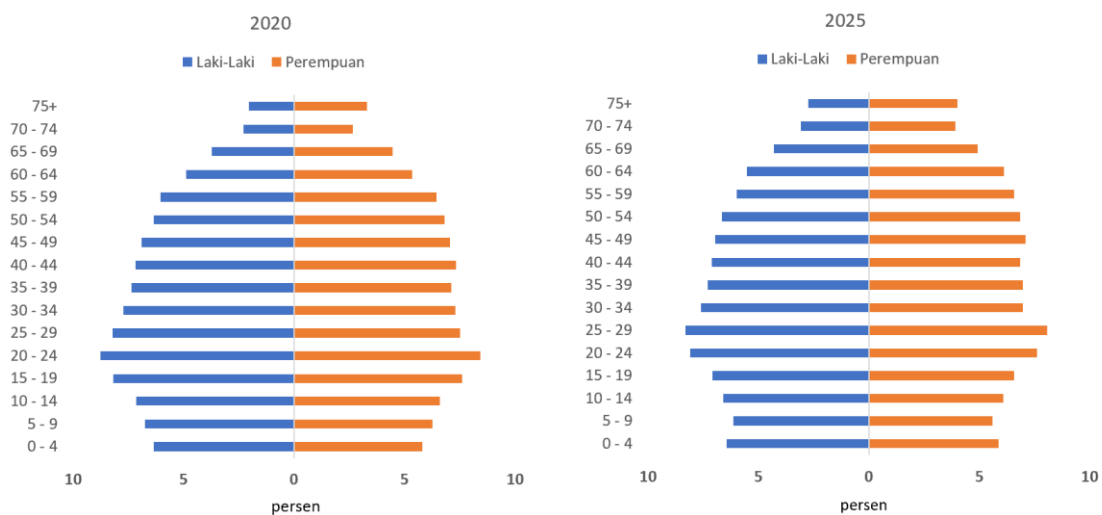
Sisi kedua adalah karena tidak mampunya Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan bonus demografi pada periode awal 2020-2045 menyebabkan kesejahteraan yang didambakan tidak diperoleh. Akibatnya dengan semakin meningkatnya ketergantungan usia non produktif, beban tersebut semakin berat dan muaranya adalah kondisi ekonomi menjadi terganggu. Hal ini sesuai temuan dari Yani dkk. (2017) bahwa tren peningkatan rasio ketergantungan dapat menjadi faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah. Terjadi peningkatan



Penduduk usia non produktif dan terjadi penurunan Penduduk usia produktif. Penurunan populasi yang berdampak pada berkurangnya Penduduk produktif yang berimplikasi terhadap ketersediaan tenaga kerja produktif di daerah. Oleh karenanya, dua sisi ini perlu diperhatikan agar prediksi peningkatan angka ketergantungan di Kota Yogyakarta ini dapat dipersiapkan dengan baik. Harapannya sisi pertama diperoleh sehingga proyeksi kenaikan angka beban ketergantungan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.

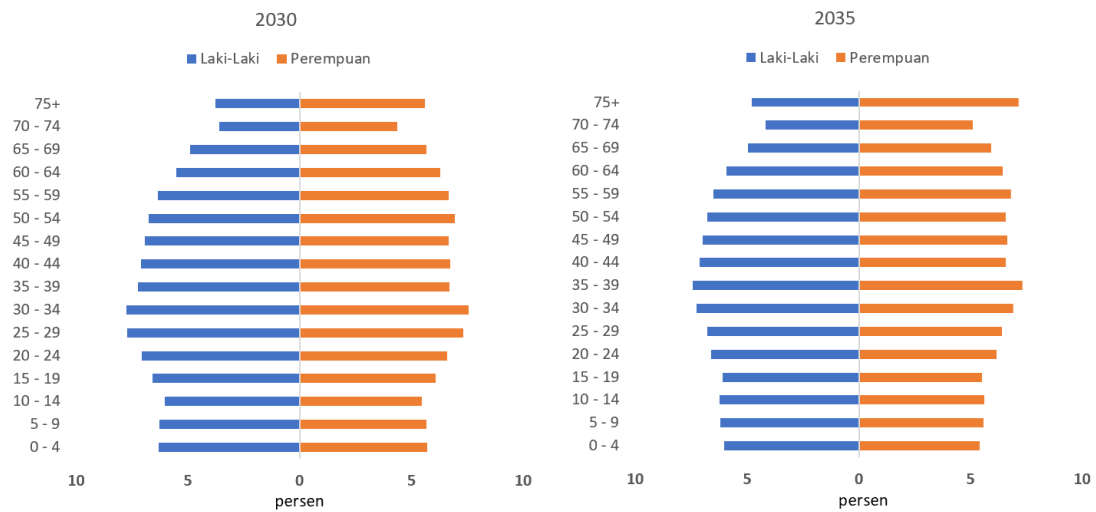
3. Dari hasil proyeksi ditemukan bahwa terdapat pola yang terus terjadi sampai 2045 yakni komposisi Penduduk di Kota Yogyakarta cenderung lebih banyak perempuan daripada Penduduk laki-laki. Pada piramida Penduduk 2020 misalnya dapat diketahui dengan jelas bahwa dominasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini akan bertahan sampai 2045. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 3.1. 4. dan 3.1. 5., dengan asumsi piramida tahun 2040 dan 2045 sama dengan piramida Penduduk tahun 2035.

Berdasarkan perbandingan antara Penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dihitung rasio jenis kelamin di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin Kota Yogyakarta sebesar 95,02 persen. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, rasio jenis kelamin diprediksi mengalami penurunan terus sampai 93,5 persen pada 2035. Kemudian sampai 2045 diprediksi angka pebandingan antara laki-laki dan perempuan berada pada nilai 92,3 persen.



Gambar 3.1. 6. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020 dan 2025





Gambar 3.1. 7. Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2030 dan 2035

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa tantangan dalam pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Yogyakarta, yaitu:

- 1) Mempertahankan tren Penduduk agar tetap tumbuh seimbang.
- 2) Menyusun strategi agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja produktif di Kota Yogyakarta. Peningkatan Penduduk usia non produktif dan menurunnya Penduduk usia produktif menyebabkan terjadinya peningkatan angka ketergantungan.
- 3) Menyusun strategi agar angka ketergantungan yang tinggi tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.
- 4) Mengelola Penduduk lansia yang jumlahnya semakin meningkat agar tidak menimbulkan permasalahan.
- 5) Memberikan kesempatan atau peluang bagi Penduduk lansia agar dapat beraktivitas mengisi waktu luangnya secara produktif.
- 6) Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan lansia, karena secara fisik dan emosional berbeda dengan Penduduk usia lainnya yang lebih muda.

3.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas Penduduk dilihat dari tiga aspek dasar yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan berupa AHH, persentase balita *stunting* dan angka kematian bayi. Nilai AHH akan mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. BPS menyatakan bahwa nilai AHH merupakan menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Kondisi yang diinginkan untuk AHH pada 2045 adalah sebesar 77,69 tahun.



Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2045 diharapkan akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun. Kondisi *stunting* pada 2020 nilainya sebesar 14,36 persen. Pada 2045 kondisi ideal yang diharapkan adalah nilainya sebesar 5,58 persen. Sedangkan angka kematian bayi di Kota Yogyakarta diharapkan nilainya mengalami penurunan. Sejak 2035-2045 diharapkan nilainya berada pada angka 7/1000 kelahiran hidup bayi. Semakin turunnya angka ini sangat baik karena nilai angka kematian bayi sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Artinya semakin kecil tingkat kesehatan dan kesejahteraan Penduduk Kota Yogyakarta semakin baik.

Pada aspek pendidikan, indikator yang digunakan yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi usia 19-24 tahun. Pada indikator rata-rata lama sekolah, pada tahun 2020 sebesar 11,46 yang artinya Penduduk menyelesaikan pendidikan formal selama 11 tahun atau hingga kelas 2 SMA/Sederajat. Pada tahun 2045 rata-rata lama sekolah diharapkan mencapai kondisi ideal sebesar 14,59 tahun. Artinya Penduduk rata-rata sudah menyelesaikan 12 tahun wajib belajar ditambah 2 tahun dalam perguruan tinggi. Pada APS SD/MI diprediksi akan mencapai angka 100% pada tahun 2045, artinya seluruh anak pada usia 7-12 tahun sudah menempuh pendidikan jenjang SD. Sementara itu, APS jenjang SMP/MTs (usia 13-15 tahun) dan jenjang SMA/SMA/MK (usia 16-18 tahun) diproyeksikan mengalami penurunan jika melihat pola pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, untuk APS jenjang SMP/MTs (usia 13-15 tahun) nilainya masih di atas 98 persen, sedangkan APS jenjang SMA/SMA/MK (usia 16-18 tahun) nilainya masih di atas 93 persen. Sementara Aps pada usia 19-24 tahun pada 2045 nilainya diharapkan sebesar 76,69 persen.

Peningkatan dan penurunan Angka Partisipasi Sekolah dipengaruhi oleh faktor seperti peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak baik secara langsung maupun tidak langsung (Aminah, 2015). Peran orang tua secara langsung berupa mendampingi anak ketika belajar, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran serta membiayai sekolah anak. Sementara peran secara tidak langsung berupa perhatian yang diberikan orang tua terhadap anak seperti memberi dorongan atau motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi, memberi pendidikan terbaik, dan sebagainya. Angka Partisipasi Sekolah juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi orang tua untuk membiayai pendidikan anak.



Pada aspek ekonomi indikator yang digunakan adalah rasio ketergantungan, persentase Penduduk miskin, pengangguran terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Gini. Pada indikator *dependency ratio* polanya mengalami kenaikan dan diprediksi pada 2045 nilainya sebesar 57,92 persen. Pada indikator persentase Penduduk miskin polanya mengalami penurunan dan pada 2045 kondisi yang diinginkan adalah persentasenya sebesar 5,15 persen. Pada angka pengangguran terbuka diharapkan pada 2045 nilainya antara 3-5 persen. Untuk TPAK nilainya sejak 2025 diharapkan nilainya sudah mencapai 75 persen dan bertahan sampai dengan akhir periode 2045. Sedangkan pada Indeks Gini diharapkan pada 2045 sudah berada pada kategori ketimpangan rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut beberapa potensi dari kondisi yang diinginkan di Kota Yogyakarta sampai 2045 adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek kesehatan, angka harapan hidup yang tinggi dan angka kematian bayi yang rendah sebagai petunjuk bahwa derajat kesehatan yang tinggi telah dimiliki oleh Kota Yogyakarta.
2. Pada aspek pendidikan, indikator yang sangat baik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Yogyakarta diharapkan sangat tinggi. Hal tersebut diperoleh dari tingginya APS di semua jenjang pendidikan, bahkan nilai APS usia 19-24 tahun yang juga dalam kategori tinggi yakni di atas 75 persen pada 2045. Hal ini menggambarkan bahwa gambaran kota pelajar sangat melekat di Kota Yogyakarta dimana Penduduk usia sekolah benar-benar berpartisipasi aktif di bangku sekolah sampai jenjang perguruan tinggi.
3. Pada aspek ekonomi, Penduduk miskin yang semakin turun menunjukkan masyarakat sudah banyak yang sejahtera di atas garis kemiskinan. Nilai partisipasi angkatan kerja juga diprediksi sangat tinggi yakni lebih dari 75 persen pada tahun 2045. Selain itu diharapkan Indeks Gini juga berada pada kategori rendah pada 2045. Artinya ketimpangan pendapatan tidak jauh antara kuantil atas dan bawah. Dengan kondisi 3-5 persen penganggur, 75 persen TPAK dan Indeks Gini pada kategori rendah maka diharapkan pada 2045 kondisi ekonomi Kota Yogyakarta berada pada level yang sangat baik.

Di sisi lain, jika Kualitas Penduduk tersebut tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan beberapa dampak yang terjadi, di antaranya:

1. Pada aspek kesehatan, karena nilai AHH yang tinggi potensi permasalahan lansia menjadi isu yang harus segera ditangani. Seperti pada pembahasan



sebelumnya, kebijakan lansia yang bersinggungan dengan aspek ketenagakerjaan, layanan kesehatan dan ekonomi harus menjadi isu prioritas ke depan bagi pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Pada aspek pendidikan, prediksi tingkat pendidikan yang tinggi di Kota Yogyakarta jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut utamanya terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi. Terjadinya *mismatch* di sektor ketenagakerjaan sangat tinggi jika pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan kompetensi lulusan yang berada pada level pendidikan yang tinggi.
3. Pada aspek ekonomi, selain disinggung tentang *mismatch* pekerjaan, dampak lain yang dapat timbul adalah tentang angka kemiskinan. Pada 2045 tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 5 persen. Dikaitkan dengan tujuan 1 SDGs yang targetnya harus selesai di tahun 2030 tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karenanya program pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta harus dilaksanakan secara maksimal.

3.3. Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Indikator yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)/I Bangga, persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna, persentase RTLH, persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman, persentase WNI usia 60+ mendapatkan *screening* kesehatan sesuai standar, persentase lansia yang mengikuti posyandu lansia dan persentase kelompok penyandang disabilitas keluarga miskin yang tertangani.

Kondisi yang diinginkan adalah pada 2045 Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)/I Bangga di Kota Yogyakarta berada pada kategori tangguh. Kategori tangguh ini bahkan diinginkan dapat terwujud sejak 2040. Kondisi yang diinginkan untuk persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna pada 2045 nilainya sebesar 25 persen. Dari sisi peningkatan kualitas lingkungan keluarga, kondisi persentase RTLH diharapkan turun terus dan sampai 2045 diharapkan persentasenya sebesar 0 persen, artinya tidak ada lagi rumah tanga tidak layak huni pada 2045 di Kota Yogyakarta. Indikator lainnya berupa persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman diharapkan nilainya sebesar 98,3 persen pada 2045.



Kondisi lainnya pada aspek pembangun berkualitas adalah diharapkan terus meningkatnya perlindungan sosial Penduduk yang tercermin dari terpenuhinya seluruhnya persentase WNI usia 60+ yang mendapatkan *screening* kesehatan sesuai standar. Selain itu persentase lansia yang mengikuti posyandu lansia diharapkan akan terus meningkat dengan capaian pada 2045 diharapkan nilainya menjadi 90 persen. Capaian lainnya yang diinginkan adalah terus meningkatnya persentase kelompok penyandang disabilitas keluarga miskin yang tertangani, dengan target pada 2045 sebesar 95 persen.

Berdasarkan kondisi tersebut maka potensi yang ditimbulkan dari kondisi yang diinginkan di masa mendatang tersebut berefek positif pada:

1. Semakin meningkatnya keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta. Hal ini berakibat pada semakin tangguhnya ketahanan keluarga yang dimiliki oleh masing-masing keluarga di Kota Yogyakarta.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan keluarga. Hal ini merupakan perwujudan Pembangunan Keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Meningkatnya perlindungan sosial juga menguatkan keluarga dari sisi ekonomi/kesejahteraannya bagi masyarakat rentan.

Akibatnya muara dari itu semua adalah terbentuknya keluarga yang sehat, berumur panjang dan produktif di Kota Yogyakarta.

3.4. Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pilar persebaran dan pengarahan mobilitas diwakili oleh indikator kepadatan Penduduk. Pada 2020 kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta sebesar 11.535 jiwa/km². Penduduk di Kota Yogyakarta terdistribusi merata di semua kemantren dengan kepadatan antara 8.500-21.000 jiwa/km². Kepadatan tertinggi ada di Ngampilan dan terendah ada di Umbulharjo.

Kondisi yang diinginkan pada 2045 kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Pada 2045 diperkirakan kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta sebesar 11.150 jiwa/km². Distribusi Penduduknya juga tersebar merata dengan estimasi kepadatan tertinggi dan terendah diprediksi sama dengan kondisi pada 2020 meskipun nilainya berubah. Potensi dari kondisi Persebaran Penduduk di Kota Yogyakarta antara lain:

1. Perubahan kepadatan Penduduk dari 2020 ke 2045 yang mengalami penurunan memberikan peluang bagi perencanaan untuk mengatur



persebaran dan pengarahannya Penduduk di Kota Yogyakarta agar tidak ada lagi perbedaan kepadatan yang sangat tinggi antar kemantren.

2. Kondisi di tahun 2020 yang menunjukkan bahwa Kemantren Umbulharjo menjadi yang terendah dan Kemantren Ngampilan menjadi yang terpadat. Bagi Kemantren Ngampilan potensi penataan ulang menjadi hal yang penting dilakukan agar kepadatan Penduduknya tidak terlalu tinggi.

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut antara lain:

1. Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dengan kemantren yang paling rendah nilainya sebesar 8.500 jiwa/km². Dengan kepadatan Penduduk tinggi tersebut, gesekan dan konflik antar warga serta kerawanan sosial sangat mungkin terjadi. Apalagi bagi kemantren yang memiliki kepadatan Penduduk yang sangat tinggi seperti Kemantren Ngampilan dengan kepadatan 21.000 jiwa/km² potensi konflik dan kerawanan menjadi lebih tinggi lagi. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan agar kenyamanan dan keamanan dapat terjaga.
2. Kepadatan Penduduk yang tinggi selain berdampak pada permasalahan keamanan juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan di aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan. Selain itu kepadatan Penduduk yang tinggi akan memengaruhi keseimbangan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan sehingga akan muncul permasalahan tentang ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Daerah dengan kepadatan Penduduk akan memiliki potensi yang besar dari permasalahan ini dibandingkan dengan daerah dengan kepadatan Penduduk yang rendah.
3. Pada masa pandemi kepadatan Penduduk yang tinggi juga akan berdampak pada cepatnya penyebaran penyakit (Tarwater & Martin, 2001; Kadi & Khelfaoui, 2020). Tantangan bagi kemantren dengan kepadatan tinggi tentu lebih tinggi terhadap hal ini dibandingkan dengan kemantren dengan kepadatan yang lebih rendah.

3.5. Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Kondisi ideal yang diinginkan pada pilar Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan tergambar dari baiknya indikator penyusunnya. Indikator yang digunakan dalam pilar ini antara lain persentase kepemilikan KTP Elektronik, persentase Penduduk yang memiliki akta kelahiran, persentase kepala keluarga yang memiliki dokumen KK, persentase cakupan dokumen akta kematian, persentase cakupan dokumen akta perkawinan, persentase cakupan dokumen akta perceraian. Indikator



terakhir yang digunakan adalah persentase cakupan ketersediaan profil Kependudukan.

Kondisi yang diinginkan untuk indikator persentase kepemilikan KTP elektronik semakin meningkat sampai 2030. Pada 2020 capainnya sebesar 98,02 persen, dan pada 2030 kondisi yang diharapkan adalah capaiannya sebesar 99 persen. Capaian ini sesuai dengan target SDGs tentang kepemilikan akta kelahiran yang mencapai 100 persen pada 2030. Pada indikator lainnya, kondisi ideal yang diharapkan adalah semuanya telah mencapai nilai 100 persen sejak 2025. Setelahnya sampai 2045 diharapkan kondisinya dapat dipertahankan dengan capaian sebesar 100 persen.

Potensi dari kondisi yang diinginkan tersebut akan menjadi capaian yang sangat baik dari sisi penataan data, informasi Kependudukan dan Adminduk. Dengan capaian 100 persen pada 2030 untuk kepemilikan akta kelahiran dan capaian 100 persen pada 2025 untuk indikator lainnya menunjukkan bahwa sistem yang dibangun sudah sedemikian kompak. Apalagi dengan adanya pelayanan online menjadikan kepemilikan Dokumen Kependudukan menjadi mudah diperoleh. Inovasi dari OPD yang dilakukan juga beragam sehingga cakupan dokumen untuk menjadi 100 persen dimungkinkan akan semakin cepat terwujud. Akibatnya data Kependudukan yang ada di Kota Yogyakarta saat itu telah *up to date* dan dapat diandalkan kesahihannya. Artinya data Kependudukan tersebut dapat digunakan sebagai data dasar bagi perencanaan pembangunan yang membutuhkan data Penduduk sebagai basisnya. Sehingga diharapkan tidak ada lagi data ganda yang ditemukan sehingga penggunaannya untuk dasar pembangunan-perencanaan sektoral serta untuk pelayanan publik lainnya.

Meskipun demikian untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang mungkin terjadi. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih adanya masyarakat yang kurang sadar akan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan yang harus segera dilaporkan. Akibatnya capaian 100 persen tersebut bisa jadi pada peristiwa yang dilaporkan saja, sedangkan peristiwa yang tidak dilaporkan kemungkinan belum tercatat.
2. Sarana dan prasarana yang tersedia perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Layanan serba online perlu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar pengurusan dokumen yang cepat selesai dan segera diterima oleh masyarakat menjadi terwujud.



BAB IV
VISI DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
DAERAH

4.1. Visi Pembangunan Kependudukan Daerah

Penyusunan visi GDPK Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 tidak terlepas dari Visi Indonesia tahun 2045, Visi Gubernur DIY, Visi Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, dan Visi GDPK DIY. Indonesia telah menyusun Visi Indonesia 2045 yang tertuang dalam dokumen ringkasan eksekutif Visi Indonesia 2045 yaitu 'Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur'. Visi tersebut mengartikan bahwa tahun 2045 Indonesia mampu menjadi negara yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki masyarakat yang sejahtera dan pemerataan pembangunan. Sedangkan Visi DIY adalah 'Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja'. Visi ini dituangkan ke dalam misi lima kemuliaan atau pancamulia sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Misi tersebut mengartikan bahwa penerapan pancamulia harus diterapkan pada semua aspek kehidupan masyarakat agar kemuliaan martabat masyarakat DIY dapat terwujud. Penyusunan Visi GDPK Kota



Yogyakarta juga melihat pada visi dan Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 yakni “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan’. Berdasarkan visi ini kemudian diturunkan ke dalam 9 misi sebagai berikut:

1. mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan;
2. mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan;
3. mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa;
4. mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
5. mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
6. mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
7. mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
8. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas;
9. mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Kota Yogyakarta ingin menunjukkan jati diri kota sebagai kota yang berpendidikan, pariwisata dengan tetap mengedepankan kebudayaan, pusat pelayanan jasa yang arif terhadap lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Visi GDPK Kota Yogyakarta melihat pada tujuan Pembangunan Kependudukan nasional tahun 2035 yaitu ‘Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera’. Visi GDPK Kota Yogyakarta juga tetap mengacu pada Visi GDPK DIY Tahun 2045 yaitu ‘Terwujudnya Penduduk Berkualitas untuk Mencapai DIY yang Berdaya, Berbudaya, Inovatif, Berkelanjutan dan Didukung Pemanfaatan Teknologi Infomasi’. Beberapa isu strategi Pembangunan Kependudukan DIY sebagai berikut:

1. kelahiran rendah;
2. laju pertumbuhan Penduduk menurun;
3. komposisi dan struktur Penduduk stasioner;
4. bonus demografi;
5. disparitas layanan pendidikan;
6. semakin tinggi kasus penyakit tidak menular;
7. *stunting*;



8. angka kemiskinan;
9. ketimpangan antar wilayah;
10. ketimpangan antar individu;
11. perpindahan Penduduk yang tidak tercatat akan berisiko pada hilangnya hak-hak pelayanan termasuk untuk mendapatkan jaminan sosial;
12. perlunya peningkatan kualitas keluarga;
13. optimalisasi fungsi keluarga;
14. masih terjadinya pernikahan dini;
15. belum terintegrasinya informasi Kependudukan dari berbagai sumber data; dan
16. belum dimanfaatkannya secara optimal data-data Kependudukan dalam perencanaan pembangunan setiap sektor.

Berdasarkan visi-visi pembangunan tersebut, dan didasarkan pada kondisi dan capaian Pembangunan Kependudukan, maka VISI Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2045 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Kependudukan yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing Tahun 2045”**.

Maksud dari visi ini adalah diharapkan Kota Yogyakarta dapat melaksanakan program-program pengendalian Kuantitas Penduduk namun tetap menjaga kualitas Kependudukan, Pembangunan Kependudukan juga diharapkan dapat mengarahkan Mobilitas Penduduk sehingga dapat terkendali dan terdata, Pembangunan Keluarga dimulai dari tingkat rumah tangga sehingga mewujudkan Penduduk yang berdaya saing, penataan data-data Kependudukan Kota Yogyakarta diharapkan dapat tertata dengan baik dan terintegrasi dengan sektor yang lainnya.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan Daerah

Isu-isu strategis adalah hal-hal yang harus diperhatikan dan dapat mempengaruhi proses pembangunan. Penyusunan isu-isu strategis Kependudukan didasarkan pada analisis situasi Kependudukan, capaian Kependudukan dan proyeksi Kependudukan Kota Yogyakarta serta telaah isu strategis Pembangunan Kependudukan DIY. Berikut diuraikan telaah isu-isu strategis Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta.

4.2.1. Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk

Angka TFR di bawah Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)

Berdasarkan hasil proyeksi tanpa intervensi TFR di Kota Yogyakarta ada diangka 1,6-1,7. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang relatif rendah.



Dibandingkan Kabupaten lain di DIY angka TFR Kota Yogyakarta adalah yang paling rendah. Sehingga patut menjadi perhatian bagaimana angka TFR dapat mendekati angka yang relatif stabil untuk menyeimbangkan proporsi Penduduk yakni di angka 1,8-2,1.

Rata-rata usia perkawinan pertama yang mengalami kenaikan

Mempertahankan rata-rata usia perkawinan pertama yang sudah ada dan segera menyelesaikan permasalahan seperti pernikahan usia dini atau kehamilan yang tidak diinginkan. Tantangan ini cukup berat mengingat lingkungan sosial dan teknologi mendukung para remaja untuk mendekati perilaku sosial yang kurang baik. Kondisi ini dilakukan persamaan dengan peningkatan kualitas pendidikan manusia utamanya perempuan dan memperkuat fungsi keluarga.

Peningkatan jumlah Penduduk lansia 2045

Berdasarkan proyeksi dapat dilihat adanya kecenderungan peningkatan persentase Penduduk lansia pada tahun 2045 menjadi 29,87%. Angka tersebut akan terus mengalami peningkatan sebab tren di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan secara linier jika tidak diintervensi oleh kebijakan atau hal-hal tertentu. Hal ini berarti diperlukan adanya kebijakan yang dapat memberdayakan jumlah Penduduk lansia tersebut agar dapat tetap berkontribusi pada pembangunan di Kota Yogyakarta.

Angka ketergantungan yang meningkat dan didominasi usia lanjut.

Bonus demografi Kota Yogyakarta diprediksikan habis periode *window opportunity* nya pada tahun 2030. Hal ini didukung meningkatnya usia lanjut akibat meningkatnya harapan hidup dan berkurangnya angka kelahiran. Berdasarkan tren yang ada usia lanjut di Yogyakarta sudah memasuki fase *ageing population*. Hal ini akan terus bertambah hingga usia non produktif yang harus ditanggung usia produktif didominasi usia lanjut. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk menyediakan kebijakan pembangunan yang pro manula.

4.2.2. Aspek Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas Pembangunan Kependudukan masih mengalami beberapa permasalahan dan tantangan, diantaranya:

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu yang mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dan kemudian sudah mulai menurun masih menjadi permasalahan yang dihadapi Kota Yogyakarta. Kenaikan AKI terbukti sangat rentan naik dengan kondisi darurat kesehatan.



Masih ditemukan kasus *Stunting*

Kasus *stunting* masih ditemukan di Kota Yogyakarta. *Stunting* menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan menjadi isu nasional dan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Berdasarkan kondisi tersebut, Kota Yogyakarta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan *stunting* untuk mendorong peningkatan Kualitas Penduduk.

Angka putus sekolah di Kota Yogyakarta

Meskipun peipersentase angka putus sekolah di Kota Yogyakarta lebih rendah dibanding dengan kabupaten lain di DIY, namun trennya cenderung meningkat. Kecenderungan meningkatnya angka putus sekolah tersebut dikhawatirkan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor *kemiskinan* (ekonomi), namun juga ikut dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang mendorong masyarakat untuk tidak melanjutkan sekolah dan menganggap pendidikan tidak penting.

Belum adanya kebijakan yang komprehensif untuk pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus

Dua hal yang diupayakan oleh pemerintah dalam hal pendidikan adalah peningkatan rata-rata lama sekolah serta pengembangan pendidikan kejuruan melalui SMK. Pendidikan kejuruan melalui SMK diorientasikan untuk siap bekerja selepas pendidikan menengah. Selain dari aspek pendidikan kejuruan pendidikan luar biasa juga patut menjadi perhatian. Angka putus sekolah yang masih relatif tinggi tentunya perlu upaya untuk dapat diakomodir pula dengan skema pendidikan khusus. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang ada seyogyanya saling berstimulasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Meningkatnya Indeks Gini

Nilai indeks gini yang semakin meningkat menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Kondisi indeks gini di angka 0,519 menunjukkan kondisi yang serius dalam aspek distribusi pendapatan. Angka tersebut sudah tergolong dalam kategori ketimpangan tinggi. Meningkatnya indeks gini menjadi proksi bahwa Pembangunan Kependudukan belum mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan *pro poor*.

Menurunnya jumlah murid sekolah dasar negeri

Jumlah murid di sekolah dasar negeri di Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan apabila dilihat sejak tahun ajaran 2019/2020 hingga 2022/2023. Disisi lain, jumlah sekolah dasar negeri pada kurun waktu tahun ajaran tersebut tidak berubah, terdapat 89 sekolah dasar negeri di Kota Yogyakarta. Lain halnya dengan jumlah guru yang berfluktuasi, mengalami penurunan



pada tahun ajaran 2021/2022 dan kembali meningkat pada tahun ajaran 2022/2023. Kondisi ini berpengaruh terhadap semakin berkurangnya jumlah murid yang diajarkan atau diampu oleh setiap guru. Penurunan jumlah murid sekolah dasar negeri perlu dikaji karena turut berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan Kota Yogyakarta kedepannya.

4.2.3. Aspek Pembangunan Keluarga

Optimalisasi fungsi keluarga

Delapan fungsi keluarga belum dapat dijalankan secara optimal nilai-nilai dalam fungsi keluarga perlu diterapkan pada masing-masing anggota keluarga. Mereka harus memahami fungsi tersebut. Sosialisasi terkait dengan fungsi keluarga ini menjadi sangat penting dan perlu terus disosialisasikan kepada setiap keluarga. Pembinaan bagi keluarga mulai dari balita dan anak, remaja, lansia perlu terus dilakukan.

Meningkatkan kualitas keluarga

Pembinaan terhadap anggota keluarga terkait dengan peran mereka dalam membangun keluarga menjadi hal yang sangat penting. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui pendidikan disekolah atau bagi orang dewasa/sudah bekerja sosialisasi dari pemerintah baik pemerintah pusat/daerah ke masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pembinaan anggota keluarga ini dimaksudkan untuk membangun keluarga sehingga keluarga menjadi organisasi yang kuat dan berkualitas.

Edukasi terkait dengan seksual bagi remaja juga perlu diberikan di tingkat sekolah. Mereka harus diberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya hubungan seksual yang sehat melalui pernikahan yang sah. Hal ini juga sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya seks bebas khususnya di kalangan remaja. Perkawinan yang sah untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

Meningkatnya jumlah anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang tertangani di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun. Hal ini berarti diperlukan adanya perhatian untuk dapat menurunkan jumlah anak terlantar yang perlu ditangani. Namun perlu diperhatikan penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Yogyakarta sehingga dapat memberikan solusi yang tepat sebab adanya anak terlantar berkaitan dengan hal-hal yang kompleks dan saling berhubungan seperti kemiskinan struktural atau kondisi psikologis keluarga.



Sinkronisasi target kepesertaan KB

Angka TFR yang rendah di Kota Yogyakarta memerlukan berbagai upaya apabila bertujuan untuk ditingkatkan sehingga keseimbangan proporsi Penduduk dapat tercapai. Adanya program KB umumnya berkaitan dengan proses penundaan kelahiran sehingga dapat berkontribusi dalam rendahnya angka TFR di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu target untuk cakupan peserta KB aktif di Kota Yogyakarta perlu disinkronkan dengan upaya pencapaian angka TFR yang optimal sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap terwujudnya proporsi Penduduk Kota Yogyakarta yang seimbang.

Penggunaan indikator Ketahanan Keluarga (IKK)/iBangga untuk pilar Pembangunan Keluarga

Perkembangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya mempengaruhi berbagai aspek salah satunya perkembangan indikator yang dapat menilai Pembangunan Keluarga. Indikator iBangga sebagai indikator yang dikeluarkan oleh BKKBN perlu dipertimbangkan untuk dapat mengukur keberhasilan kualitas Pembangunan Keluarga melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Kota Yogyakarta telah menyusun Perwal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ke depan masyarakat dapat melakukan pengukuran secara mandiri melalui sistem informasi yang telah disiapkan atau melalui wawancara bagi yang tidak mampu. Sehingga pengukuran ketahanan keluarga menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan datang.

4.2.4. Aspek Mobilitas Penduduk

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk di seluruh kemantren di Kota Yogyakarta telah menunjukkan angka yang sangat padat. Bertambahnya jumlah Penduduk di masa mendatang menjadikan semakin tingginya permintaan akan hunian dan lahan untuk hidup. Semakin tingginya tingkat kebutuhan lahan, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan akan terlampaui sehingga akan timbul permasalahan-permasalahan baru seperti polusi udara, banjir, kemacetan, dll. Dampaknya, kawasan permukiman kumuh (*slums*) dan hunian liar (*squatter settlement*) semakin luas dan akan menjadi beban Kota Yogyakarta.

Angka Migrasi Netto Negatif dan Migrasi Ulang Alik di Kota Yogyakarta

Angka migrasi Kota Yogyakarta menunjukkan tren angka migrasi netto yang negatif. Hal ini berarti ada kecenderungan Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggalkan Kota Yogyakarta lebih besar daripada angka migrasi masuk.



Angka migrasi netto negatif ini dapat berdampak pada keluarnya sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan fenomena brain drain. Kondisi ini dapat berdampak negatif dalam hal mengurangi usia produktif yang dapat membantu mengurangi angka ketergantungan di Kota Yogyakarta. Migrasi masuk di Kota Yogyakarta yang bersifat permanen didominasi usia tua sebagai bagian dari lokasi Penduduk menghabiskan usia pensiunnya.

Selain migrasi masuk permanen, migrasi non permanen (penglaju) menjadi tantangan tersendiri untuk Kota Yogyakarta. Kepadatan Penduduk siang menyebabkan kemacetan lalu lintas pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Baiknya fasilitas pendidikan negeri maupun swasta menjadi daya tarik pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di Kota Yogyakarta. Efek positif dari banyaknya pendatang dari berbagai daerah dapat memperbesar investasi dan kerjasama antar daerah. Akan tetapi, jika jumlah pelajar dan mahasiswa baru yang masuk cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pelajar dan mahasiswa yang keluar kembali ke daerah asal setiap tahunnya menyebabkan Kota Yogyakarta akan menjadi semakin padat. Sehingga dibutuhkan strategi kebijakan multisektoral untuk mengatur arus migrasi masuk dan keluar agar terjadi Penduduk seimbang yang sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah.

4.2.5. Aspek Administrasi dan Database Kependudukan

Menuju cakupan pencatatan Penduduk 100%

Permasalahan dan tantangan tentang data dan informasi Kependudukan terkait integrasi data Kependudukan dan data sektoral yang belum optimal. Selain itu permasalahan belum terpenuhinya capaian 100 persen dari kepemilikan Dokumen Kependudukan menjadi tantangan ke depan yang harus segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan pemenuhan kepemilikan dokumen merupakan hak dasar bagi Penduduk dan hal ini juga menjadi agenda pembangunan ke depan dalam SDGs.

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah memiliki banyak inovasi terkait dengan pelayanan Administrasi Kependudukan, sehingga kedepan optimalisasi pelayanan harus terus ditingkatkan untuk mendorong 100% kepemilikan dokumen administrasi Penduduk.



BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Guna mencapai Visi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, maka disusun strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta. Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Kependudukan ini juga untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis Pembangunan Kependudukan yang ada. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program prioritas untuk mencapai sasaran Pembangunan Kependudukan. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis Pembangunan Kependudukan. Berikut diuraikan kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta.

5.1. Strategi Kebijakan

Dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta dan untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis Kependudukan, maka strategi Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta tahun 2045 diarahkan sebagai berikut:

- a. mendorong pertumbuhan Penduduk seimbang;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- c. meningkatkan Kualitas Penduduk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga, mendorong kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas lingkungan keluarga;
- e. meningkatkan perlindungan sosial;
- f. meningkatkan infrastruktur penunjang mobilitas; dan
- g. mengelola sistem informasi pelayanan Administrasi Kependudukan.

5.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun arah kebijakan pilar-pilar Pembangunan Kependudukan yang diuraikan sebagai berikut.

5.2.1. Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kota Yogyakarta memiliki angka TFR di bawah angka pertumbuhan Penduduk seimbang yaitu 1,67 pada tahun 2020. Demikian halnya dengan angka MUKP yang berada pada angka 22,9. Oleh karena itu, maka kebijakan untuk mendorong pertumbuhan Penduduk seimbang adalah dengan melakukan pengaturan fertilitas. Pengaturan fertilitas diperlukan agar angka



TFR tidak terus mengalami penurunan yang dapat menyebabkan penurunan jumlah Penduduk. Arah kebijakan pengendalian Kuantitas Penduduk disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mendorong pertumbuhan Penduduk seimbang	Pengaturan fertilitas

Sumber : Olah data, 2023

5.2.2. Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

Untuk mendorong peningkatan Kualitas Penduduk maka kebijakan Pembangunan Kependudukan diarahkan dengan meningkatkan indikator kualitas hidup. Indikator kualitas hidup dapat dilihat melalui angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan Kualitas Penduduk bidang kesehatan diarahkan melalui kebijakan penurunan mortalitas dan peningkatan kualitas ibu dan anak, peningkatan status gizi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan kualitas bidang pendidikan diarahkan melalui peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan harus terus ditingkatkan baik pada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri juga perlu diupayakan untuk mendorong pemerataan minat murid dalam mendapatkan akses pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan Kualitas Penduduk dibidang ekonomi, diarahkan untuk meningkatkan status ekonomi Penduduk dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Berikut diuraikan Tabel 5.2 Arah Kebijakan Peningkatkan Kualitas Penduduk.

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan indikator kualitas hidup manusia
2	Meningkatkan kualitas Penduduk bidang kesehatan	Penurunan mortalitas dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan
		Peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan



No	Strategi	Arah kebijakan
		ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
3	Meningkatkan Kualitas Penduduk bidang pendidikan	Peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik
4	Meningkatkan Kualitas Penduduk bidang ekonomi	Peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengganguran Pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengganguran

Sumber : Olah data, 2023

5.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang dibangun oleh Penduduk untuk menjalankan fungsi keluarga. Oleh karena itu, maka keluarga menjadi penentu kuantitas, kualitas dan Mobilitas Penduduk. Kebijakan Pembangunan Keluarga di Kota Yogyakarta diarahkan dalam meningkatkan keluarga berkualitas, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera meningkatkan kualitas lingkungan keluarga, meningkatkan kesejahteraan lansia dan meningkatkan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas. Kebijakan dalam perlindungan sosial juga diarahkan dalam Pembangunan Keluarga karena pada tahun 2045, Kota Yogyakarta diproyeksikan akan memiliki jumlah Penduduk usia tua yang lebih besar dari Penduduk usia muda. Berikut Tabel 5.3 arah kebijakan Pembangunan Keluarga.



Tabel 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga

No	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan ketahanan keluarga, mendorong kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga	Meningkatkan keluarga berkualitas
		Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
		Meningkatkan kualitas lingkungan keluarga
2	Meningkatkan perlindungan sosial	Meningkatkan kesejahteraan lansia
		Meningkatkan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas

Sumber : Olah data, 2023

5.2.4. Arah Kebijakan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kota Yogyakarta memiliki angka kepadatan Penduduk yang cukup tinggi pada semua kemantren. Fungsi pusat perkotaan yang melekat pada Kota Yogyakarta menyebabkan Mobilitas Penduduk tinggi. Jika mobilitas tinggi tidak dapat diantisipasi maka berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti polusi udara, kemacetan, kebutuhan lahan yang semakin tinggi dan sebagainya. Kondisi ini dapat diperparah apabila Penduduk yang masuk memiliki keahlian rendah dan berpotensi menyebabkan tumbuhnya permukiman kumuh dan dapat menjadi beban Kota Yogyakarta. Keberadaan migrasi non permanen (penglaju) menjadi tantangan tersendiri untuk Kota Yogyakarta. Kepadatan Penduduk siang menyebabkan kemacetan lalu lintas pada jam-jam berangkat dan pulang kerja. Oleh karena kondisi tersebut maka arah kebijakan persebaran dan Mobilitas Penduduk diarahkan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut disajikan Tabel 5.4 arah kebijakan persebaran dan Mobilitas Penduduk.

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk

No	Strategi	Arah kebijakan
1	Meningkatkan infrastruktur penunjang mobilitas	Meningkatkan kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan

Sumber : Olah data, 2023



5.2.5. Arah Kebijakan Penataan Data dan Informasi Kependudukan

Kota Yogyakarta telah memiliki banyak inovasi bidang administrasi database Kependudukan. Inovasi yang telah dilakukan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan. Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ke depan Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang terintegrasi, agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses pelayanan Administrasi Kependudukan. Berikut disajikan Tabel 5.5 arah kebijakan penataan dan pengelolaan database Kependudukan.

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Database Kependudukan

No	Strategi	Arah kebijakan
1	Mengelola Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Menyusun pelayanan Administrasi Kependudukan yang mampu mencakup seluruh Penduduk
		Perluasan program identitas Kependudukan digital

Sumber : Olah data, 2023



BAB VI PETA JALAN

Peta jalan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arah Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta tahun 2025-2045. Peta jalan ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan arah kebijakan dan program-program Pembangunan Kependudukan baik itu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Peta jalan ini menunjukkan target capaian setiap indikator Pembangunan Kependudukan untuk jangka waktu 2025-2045. Peta jalan disusun berdasarkan proyeksi Pembangunan Kependudukan dan kemampuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta dalam menjalankan program-program Pembangunan Kependudukan. Peta jalan ini disajikan sesuai dengan pilar-pilar Pembangunan Kependudukan yaitu pengendalian Kuantitas Penduduk, peningkatan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Pengarahan Mobilitas Penduduk dan penataan dan pengelolaan database Kependudukan.

6.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Roadmap pembangunan Kuantitas Penduduk pada 2025-2045 diarahkan untuk pengaturan fertilitas di Kota Yogyakarta. Pada 2025-2030 nilai TFR diproyeksikan turun, kemudian nilainya diproyeksi akan naik lagi sampai 2045 menjadi 1,64. Pengaturan fertilitas juga dilakukan dengan optimalisasi program Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta. Persentase peserta KB metode jangka panjang (MKJP) serta kontrasepsi modern diproyeksikan meningkat hingga tahun 2045 mencapai 60% sehingga *unmetneed* dapat diturunkan pada tahun 2045 menjadi 17,8%. Secara rinci roadmap indikator pengendalian Kuantitas Penduduk di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Angka <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,67	1,63	1,61	1,62	1,63	1,64
Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita usia 15-49	22,9*	23,3	23,4	23,5	23,6	23,7
Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	47,7*	49,8	52,3	54,9	57,4	60



Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR</i>)	50,4*	52	54	56	58	60
Unmetneed	24,12*	22,53*	21,8	20,4	19,1	17,8
ASFR 15-19 tahun	10*	9,80	9,60	9,40	9,10	8,90

* Data dasar 2021 berdasarkan sumber PK 2021

6.2. Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk

6.2.1. Bidang Pembangunan Manusia

Roadmap bidang pembangunan manusia pada 2025-2045 diarahakan untuk peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meningkatnya angka IPG menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender. Kota Yogyakarta berupaya untuk mendorong angka kesetaraan gender agar tidak terjadi kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Sedangkan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Nilai IPM diharapkan terus mengalami peningkatan hingga dapat mencapai 95 pada tahun 2045. Target ini juga melihat pada proyeksi usia Penduduk tahun 2045 yang didominasi oleh struktur Penduduk usia tua. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan untuk mendorong kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2045. Berikut disajikan Tabel peta jalan peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Tabel 6.2 Roadmap Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,16	98,54*				
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	86,61	88,12	88,8	89,5	90,2	91

*target berdasarkan Kepwal Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023



6.2.2. Bidang Kesehatan

Roadmap peningkatan Kualitas Penduduk bertujuan meningkatkan derajat kesehatan Penduduk. Kualitas Penduduk bidang kesehatan ditingkatkan melalui penurunan mortalitas khususnya bagi ibu dan anak serta mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik. Oleh karena itu AKI tahun 2045 ditargetkan sebesar 64,09% sedangkan untuk AKB sebesar 11,17%. Akses pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak harus diberikan sejak ibu hamil sehingga ibu mendapatkan edukasi terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan ibu dan janin sehingga bayi yang dilahirkan dapat sehat dan kesehatan ibu tetap terjaga.

Stunting merupakan salah satu isu kesehatan yang penting untuk diperhatikan. Stunting juga menjadi isu global yang harus segera diselesaikan. Pada tahun 2045, isu stunting harus diturunkan dan di tahun 2045 ditargetkan sebesar 13,36%. Pentingnya memberikan makanan bergizi saat janin masih dalam kandungan harus menjadi hal yang penting dilakukan, dan pemberian makanan bergizi harus dilanjutkan hingga tumbuh dewasa.

Pengendalian penyakit menular menjadi salah satu hal yang penting untuk ditargetkan pada tahun 2045. Beberapa penyakit menular seperti HIV harus dapat diatasi dan Kota Yogyakarta ditargetkan bebas penyakit menular tersebut pada tahun 2045. Namun demikian untuk penyakit TBC, pada tahun 2045 penemuan dan pengobatan kasus ini ditargetkan sebesar 90%.

Untuk mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, maka diperlukan akses air bersih, sanitasi layak dan mendorong peningkatan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Target pencapaian PHBS pada tahun 2045 sebesar 75%, sedangkan target akses terhadap air minum dan sanitasi aman sebesar 100%. Secara rinci roadmap indikator peningkatan Kualitas Penduduk di bidang kesehatan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Kesehatan

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Angka Kematian Ibu (AKI)	64,14	64,13	64,12	64,11	64,1	64,09
Angka Kematian Bayi (AKB)	11,22	10,58*				
Persentase ASI Eksklusif	73,2	76,75	78,75	80,75	82,75	84,75



Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Angka Harapan Hidup (AHH)	74,76	74,89*	75,85	76,46	77,08	77,69
Angka Kematian Balita	13,14	13,13	13,12	13,11	13,1	13,09
Persentase Balita Gizi Buruk	1,3	1,28*	1,26	1,24	1,22	1,2
Persentase Balita Stunting	14,36	14,16*	13,96	13,76	13,56	13,36
Persentase rumah tangga ber PHBS	28,57	58	60	65	70	75
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC	90	90	90	90	90	90
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100
Persentase RT menggunakan air minum	95	100	100	100	100	100
Persentase akses sanitasi aman	98,59	100	100	100	100	100

*target berdasarkan Kepwal Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023



6.2.3. Bidang Pendidikan

Roadmap peningkatan Kualitas Penduduk di bidang pendidikan diarahkan untuk peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi sekolah pada kelompok usia 7-12 tahun (tingkat SD/MI), 13-15 tahun (tingkat SMP/MTs), dan kelompok usia 16-18 tahun (tingkat SMA/SMK/MA) ditargetkan mencapai angka 99,9% pada tahun 2045. Angka rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta diarahkan mencapai 14,59 pada tahun 2045. Target angka ini sedikit lebih rendah daripada target rata-rata lama sekolah Provinsi DIY yang diharapkan menjadi 15,00 pada tahun 2045. Angka harapan lama sekolah Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 17,43. Pada tahun 2045, angka harapan lama sekolah ditargetkan mencapai 18 tahun. Secara rinci roadmap indikator peningkatan Kualitas Penduduk di bidang pendidikan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Pendidikan

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI (7-12 thn)	99,93	99,95	99,96	99,98	99,99	99,99
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs (13-15 thn)	99,62	99,69	99,76	99,83	99,91	99,98
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (16-18 thn)	99,26	99,40	99,57	99,71	99,85	99,99
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 19-24 tahun	68,67	68,68	70,00	76,66	76,67	71,00
Persentase Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,46	11,91*	12,62	13,25	13,90	14,59
Persentase Angka Harapan Lama Sekolah	17,43	17,66	17,75	17,83	17,92	18,00



6.2.4. Bidang Ekonomi

Roadmap peningkatan Kualitas Penduduk di bidang ekonomi diarahkan untuk peningkatan status ekonomi Penduduk dan pengurangan kesenjangan ekonomi di Kota Yogyakarta. Peningkatan status ekonomi Penduduk dapat dilihat melalui upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT), sehingga berdampak pada penurunan persentase Penduduk miskin, pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, dan penurunan indeks gini. Secara rinci roadmap indikator peningkatan Kualitas Penduduk dibidang ekonomi Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Pendapatan Per Kapita (ribu rupiah)	72.291	x	x	x	x	x
Persentase Penduduk miskin (%)	7,27	6,07-6,6*	6,06-6,45	6,05-6,30	6,04-6,25	6
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,62	69,9	71,2	72,4	73,7	75
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,16	6,61-6,68*	6,2	5,8	5,4	4-5,5
Persentase Rasio Ketergantungan (DR)	40,3	42,55	46,43	50,62	54,23	57,92
Laju pertumbuhan ekonomi (%)	-2,42	5-6%	5-6%	5-6%	5-6%	5-6%
Indeks Gini	0,42	0,385-0,480	0,375-0,420	0,375-0,420	0,375-0,420	0,375-0,420

*target berdasarkan Kepwal Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023

6.3. Roadmap Pembangunan Keluarga Berkualitas

Roadmap pembangunan keluarga berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan meningkatkan perlindungan sosial. Secara rinci roadmap indikator pembangunan keluarga berkualitas di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 6.6.



Tabel 6.6 Roadmap Pembangunan Keluarga Berkualitas

Indikator	Tahun	Target				
	Dasar (2020)	2025	2030	2035	2040	2045
Indeks Ketahanan Keluarga (IKK)/I Bangga	58,44*	kategori berkembang (40-70)	kategori berkembang (40-70)	kategori berkembang (40-70)	kategori tangguh (>70)	kategori tangguh (>70)
Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna	Na	7,19	11,5	16	20,5	25
Persentase RTLH	2,11	1,38	0,98	0,58	0,18	0
Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	93,29	94,29	95,3	96,3	97,3	98,3
Persentase WNI usia 60+ mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100
Persentase lansia yang mengikuti posyandu lansia	Na	75-80%	82,5	85	87,5	90%



6.4. Roadmap Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Roadmap Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kota Yogyakarta 2025–2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. Tabel 6.7 menunjukkan rincian target pada indikator data dan informasi Kependudukan.

Tabel 6.7 Roadmap Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase kualitas sarana prasarana jalan, jembatan, dan bangunan pelengkap jalan	92,00%	92,50%	92,75%	92,75%	92,75%	92,75%
Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses air siap minum melalui jaringan perpipaan	16.70%	30%	42,5%	55%	67,5%	80%
Persentase rumah tangga yang telah memiliki akses layanan air limbah domestik	98,48%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	87.60%	87,73%*	89%	91%	93%	95%
Panjang pelengkap jalan dalam kondisi baik yang telah mendukung akses difabel dan lansia	175,34 km	175,34 km	175,34 km	175,34 km	175,34 km	175,34 km



Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	97.89%	98,62%	99,02%	99,42%	100%	100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,64 (Kurang Baik)	55,47-60* (Kurang Baik)	>70 & <80 Baik	>80 Sangat Baik	>80 Sangat Baik	>80 Sangat Baik

6.5. Roadmap Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Roadmap data dan informasi Kependudukan Kota Yogyakarta 2025–2045 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan. Tabel 6.8 menunjukkan rincian target pada indikator data dan informasi Kependudukan.

Tabel 6.8 Roadmap data dan informasi Kependudukan

Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase kepemilikan akta kelahiran	73,09%	78,70%	85,55%	92,63%	98,05%	99,94%
Persentase kepemilikan kartu keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Cakupan Pelayanan Akta Kematian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kepemilikan Akta perkawinan	74,5%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Cakupan Pelayanan Akta Perceraian	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Indikator	Tahun Dasar (2020)	Target				
		2025	2030	2035	2040	2045
Persentase kepemilikan KTP elektronik	98,02%	98,64%	99%	99%	99%	99%
Persentase kepemilikan IKD (Identitas Kartu Digital)	N/A	5%	75%	99%	99%	99%
Persentase Kepemilikan KIA	N/A	99%	99%	99%	99%	99%



BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

1. Pilar Kuantitas Penduduk Kota Yogyakarta dilihat dari jumlah Penduduk Kota Yogyakarta akan mengalami kenaikan jumlah Penduduk sampai tahun 2025. Setelah itu adanya kecenderungan akan mengalami penurunan jumlah Penduduk sampai tahun 2045. Hal ini tidak terlepas dari kecenderungan angka TFR yang rendah di bawah angka TFR tumbuh seimbang TFR 2,1. Selain itu, dominasi jumlah Penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) juga akan mengalami penurunan. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan peningkatan angka ketergantungan Penduduk.
2. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta pilar Kualitas Penduduk bidang pembangunan manusia menunjukkan peningkatan persentase IPM dan persentase IPG. Sedangkan pada bidang pendidikan persentase APS setiap kelompok umum menunjukkan tren kenaikan. Meskipun pada tahun 2022, persentase APS mengalami penurunan. Namun untuk angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Terdapat permasalahan pada partisipasi murid di SD Negeri yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi Kualitas Penduduk bidang kesehatan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada saat pandemik Covid 19 pada angka kematian ibu. Namun demikian, setelah pandemik Covid-19 mulai berkurang angka kematian ibu berangsur menurun. Persentase angka gizi buruk dan kasus *stunting* mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk persentase PHBS mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Dalam hal pengendalian penyakit, jumlah pasien diare mengalami dinamika kenaikan dan penurunan, sedangkan untuk TB mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2022. Kondisi Kualitas Penduduk di bidang ekonomi menunjukkan persentase jumlah Penduduk miskin yang mengalami penurunan. Persentase TPAK yang meningkat setiap tahun dan TPT yang juga meningkat selama pandemi dan secara perlahan sudah mengalami penurunan. Namun demikian untuk ketimpangan yang dilihat dari Indeks Gini ada indikasi mengalami kenaikan setiap tahunnya.



3. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta pilar Pembangunan Keluarga menunjukkan dinamika kenaikan pada jumlah kelompok Bina Keluarga Sejahtera setiap tahunnya. Penanganan terkait dengan lansia terlantar mengalami kenaikan setiap tahunnya demikian halnya dengan jumlah anak terlantar tertangani juga semakin meningkat. Persentase KSJPS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun data KSJPS ini tidak bisa digunakan sebagai indikator keluarga miskin.
4. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta pilar persebaran dan mobilitas Penduduk menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi di wilayah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, angka migrasi keluar di Kota Yogyakarta lebih besar dari angka migrasi masuk, sehingga migrasi netto nya bernilai negatif. Apabila dilihat secara keseluruhan di setiap kemantren maka hampir semua kemantren menunjukkan migrasi netto negatif kecuali Kemantren Kotagede dan Wirobrajan. Dalam hal infrastruktur penunjang mobilitas persentase air minum, jalan dalam kondisi mantab dan drainase dalam kondisi baik menunjukkan kenaikan yang positif.
5. Kondisi Kependudukan Kota Yogyakarta pilar Administrasi Kependudukan peningkatan kepemilikan dokumen-dokumen Administrasi Kependudukan seperti kepemilikan KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan kartu keluarga, akta perkawinan, akta perceraian. Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Yogyakarta, telah dilakukan dengan beragam inovasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi.
6. Strategi Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta tahun 2045 diarahkan sebagai berikut a) mendorong pertumbuhan Penduduk seimbang, b) meningkatkan kualitas pembangunan manusia, c) meningkatkan Kualitas Penduduk bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, d) meningkatkan ketahanan keluarga, mendorong kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas lingkungan keluarga, e) meningkatkan perlindungan sosial, f) meningkatkan infrastruktur penunjang mobilitas dan g) mengelola sistem informasi pelayanan Administrasi Kependudukan.
7. Arah kebijakan pembangunan pilar-pilar Pembangunan Kependudukan sebagai berikut a) pengaturan fertilitas, meningkatkan indikator kualitas hidup manusia, penurunan mortalitas dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan



kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan Penduduk, peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses Penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik, peningkatan status ekonomi Penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, pengurangan ketimpangan ekonomi. Selain itu salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, meningkatkan keluarga berkualitas, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, meningkatkan kualitas lingkungan keluarga, meningkatkan kesejahteraan lansia, meningkatkan kesejahteraan kelompok penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas permukiman yang inklusif dan berkelanjutan, menyusun pelayanan Administrasi Kependudukan yang mampu mencakup seluruh Penduduk, perluasan program identitas Kependudukan digital.

7.2. Saran

1. Dokumen GDPK Kota Yogyakarta menjadi dokumen arah kebijakan Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta hingga tahun 2045.
2. Dokumen GDPK diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen ini menjadi panduan dalam penyusunan rencana penyusunan kebijakan Kependudukan lainnya.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

